



Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung

RENCANA KERJA RENJA TAHUN 2027



PERENCANAAN
TERARAH



KINERJA
OPTIMAL



PELAYANAN
BERKUALITAS

Jl. Pahlawan No.21 Temanggung
Telp (0293) 49112
Fax. (0293) 492421
Email : dputemanggung@gmail.com

kode pos 56226

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam
dan Infrastruktur



Ir. GUNADI, M.M.
NIP. 196807212007011017

Petugas Verifikator,



DWI LESTARI, S.T.
NIP. 199409162022022001

Mengetahui,

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2027 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja merupakan Rencana satu tahun ke depan dalam mencapai suatu tujuan yaitu mendukung Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjalani roda pemerintahan khususnya dalam urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang maka diperlukan suatu perencanaan yang terpadu dan terarah.

Perencanaan yang terpadu dan terarah tersebut perlu ditunjang oleh beberapa misi yang dijabarkan dalam tujuan, program, kebijakan, untuk mencapai sasaran yang tepat. Langkah – langkah yang perlu diambil tersebut terangkum dalam suatu Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung tahun 2027.

Temanggung, 24 Juli 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19760810 200312 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASIii

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISIiv

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum7

1.3. Maksud dan Tujuan.....9

1.4. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II 11

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH..... 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029..... 11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung34

2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)34

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 106

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD 116

2.5. *Review* terhadap rancangan awal RKPD..... 120

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 137

2.7. Inovasi Perangkat Daerah 138

2.8. Penghargaan 139

BAB III..... 140

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 140

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 140

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 142

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 145

BAB IV..... 174

4.1. Program dan Kegiatan..... 174

BAB V 182

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027..... 182

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027..... 182

BAB VI..... 187

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026 Kabupaten Temanggung	12
Tabel 2.1.1	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Sasaran 1	28
Tabel 2.1.2	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Sasaran 2	29
Tabel 2.1.3	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Sasaran 3	31
Tabel. 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung	34
Tabel. 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung	36
Tabel. 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung	37
Tabel. 2.3.2	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	39
Tabel. 2.4	Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025	117
Tabel. 2.5	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027	122
Tabel. 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Temanggung	136
Tabel. 2.7	Inovasi Perangkat Daerah	137
Tabel. 2.8	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	138
Tabel. 3.1	Dukungan Program Prioritas Nasional/Daerah	139
Tabel. 3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027	142
Tabel. 3.4	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung Tahun 2027	147
Tabel. 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung Tahun 2027	149
Tabel. 5.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	156
Tabel. 5.2	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	157
Tabel. 5.3	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung (sesuai pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025)	160

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

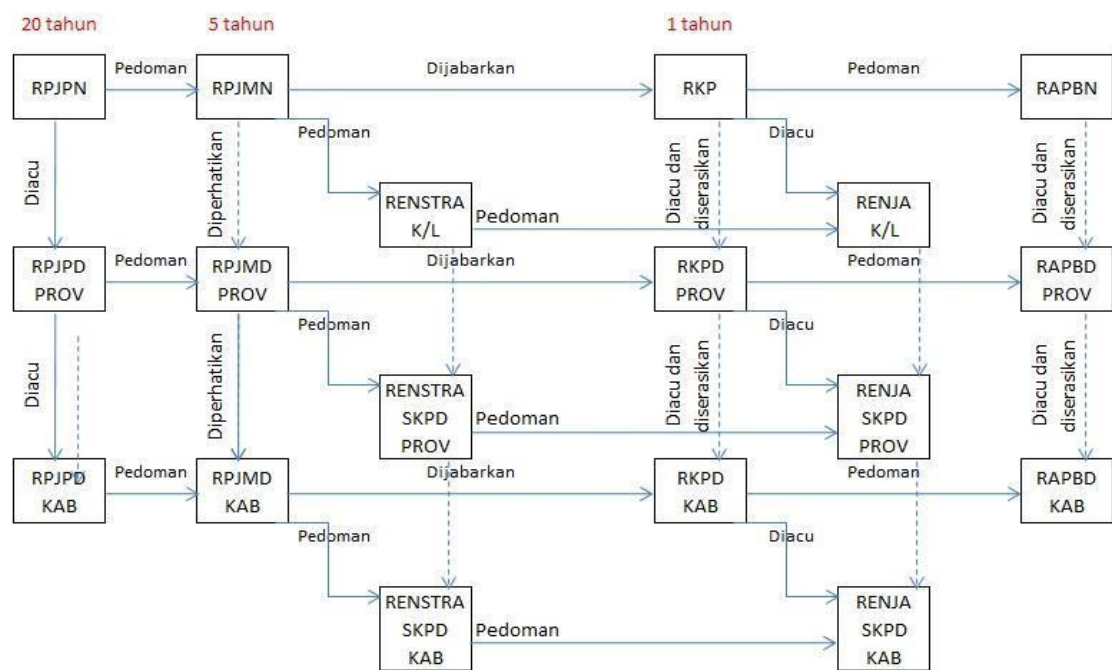
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

b. Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;

5) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

1. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
 13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
 s.d Tahun 2026 Kabupaten Temanggung

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
1	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							69,769,053,398		3,866,034,380	
1.03	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							69,769,053,398		3,866,034,380	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							13,603,739,398		3,610,670,908	29,33
		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	%	100	100	100	100		100		100
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1.03.01. 2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				7	0	0	0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
	Perangkat Daerah										
1.03.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12,336,850,573		3,360,958,489	
1.03.01. 2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	1464	1464	100	1464	12,336,850,573	366	3,360,958,489	25
1.03.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							123,500,000		10,589,000	
1.03.01. 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	9,500,000	3	135,000	25
1.03.01. 2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	48	100	48	28,500,000	12	3,082,500	25
1.03.01. 2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	24	100	12	19,000,000	6	1,510,000	50
1.03.01. 2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	Laporan	12	12	100	12	19,000,000	3	2,626,500	25
1.03.01. 2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	12	47,500,000	3	3,235,000	25

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
1.03.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							909,688,825		215,753,366	
1.03.01. 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	95,000,000	3	19,559,974	25
1.03.01. 2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	814,688,825	3	196,193,392	25
1.03.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							233,700,000		23,370,053	
1.03.01. 2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52	52	100	48	224,200,000	13	22,366,153	27,08
1.03.01. 2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57	57	100	51	9,500,000	14	1,003,900	27,45
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	8	8	100					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							1,613,000,000		40,536,968	
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	58.75	58.90	100	59.26		59.28		100
1.03.02. 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							75,000,000		0	
1.03.02. 2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit				3	75,000,000	0	0	0
1.03.02. 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							1,538,000,000		40,536,968	
1.03.02. 2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	1	1	100					
1.03.02. 2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM				0	75,000,000	0	0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
1.03.02. 2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	819.97	820	100	859.43	1,250,000,000	86	40,536,968	10
1.03.02. 2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga				3	50,000,000	0	0	0
1.03.02. 2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (2025)	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	2	2	100					
1.03.02. 2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa (2026)	Jumlah Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	1	1	100	2	163,000,000	0	0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							3,400,533,000		4,773,000	
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	%	100	100	100	100		0		0
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	59.01	60.38	100	59.02		60.50		100
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	26.64	19.23	72.18	31.14		19.35		62.13
		Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	26.63	19.23	72.21	31.13		19.35		62.15
1.03.03. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							3,400,533,000		4,773,000	
1.03.03. 2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	Dokumen				5	50,000,000	0	1,437,500	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
1.03.03. 2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (2026)						3	3,290,533,000	0	3,335,500	0
1.03.03. 2.01.0028	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (2025)	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Kegiatan Padat Karya / SPAM Berbasis Masyarakat	SR	1	1	100					
1.03.03. 2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1	100	1	160,000,000	0	0	0
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							869,200,000		0	
		Presentase Saluran Drainase Kondisi Baik	%	69.2	69.2	100	69.25		69.22		99.95
1.03.06. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							869,200,000		0	
1.03.06. 2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	1	1	100					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
1.03.06. 2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan				1	619,200,000	0	0	0
1.03.06. 2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan				6	250,000,000	0	0	0
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							2,057,500,000		6,272,500	
		Persentase Penerbitan PBG Dan SLF Terhadap Pengajuan PBG dan SLF Melalui SIMBG	%	64.24	57,95	90,21	64.64		68.29		100
		Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80	86.94	100	80.25		86.94		100
1.03.08. 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							2,057,500,000		6,272,500	
1.03.08. 2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang	Bangunan Gedung				2	1,800,000,000	0	350,000	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
		Diubahsuaikan									
1.03.08. 2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung				1	185,000,000	0	0	0
1.03.08. 2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Pembangunan di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IzinMendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dilaksanakan	Paket	1	1	100					
1.03.08. 2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	Dokumen	50	50	100	80	72,500,000	0	5,922,500	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
	dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	melalui SIMBG									
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							2,317,500,000		0	
		Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68.62	68.83	100	68.63		68.83		100
		Persentase Ketersediaan Trotoar Terhadap Total Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	%	10.12	10.13	100	10.13		10.13		100
1.03.09. 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota							2,317,500,000		0	
1.03.09. 2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kawasan				1	2,317,500,000	0	0	0
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	Kawasan	7	7	100					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
	Kawasan Strategis Lainnya	dan Kawasan Strategis Lainnya									
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							45,435,081,000		183,005,004	
		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89.50	87.90	98.21	89.85		86.14		95.87
		Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	%	94.36	92.58	98.11	94.37		91.10		96.53
		Persentase Jalan dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan	%	22.59	22.73	100	22.62		22.73		100
1.03.10. 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							45,435,081,000		183,005,004	
1.03.10. 2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen				1	50,000,000	0	0	0
1.03.10. 2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	1	1	100	1	50,000,000	0	0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
1.03.10. 2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	0.140	0.140	100				0,7	
1.03.10. 2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	1	1	100	650.476	75,000,000	0	0	0
1.03.10. 2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	10	10	100	100	6,000,000,000	15	169,968,328	15
1.03.10. 2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM				0,7	400,000,000	0	0	0
1.03.10. 2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	0.64	0.64	100	1.15	33,969,831,000	0	8,327,000	0
1.03.10. 2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	0.40	0.40	100	1.2	1,897,150,000	0	2,910,566	0
1.03.10. 2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jembatan	1	1	100	2	100,000,000	0	280,000	0
1.03.10. 2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	1.125	1.125	100	0.660	2,893,100,000	0	1,519,110	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							45,000,000		0	
		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	100	100	100	100		0		0
1.03.11. 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							45,000,000		0	
1.03.11. 2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	30	43	100	30	45,000,000	0	0	0
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							427,500,000		20,776,000	
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Rencana Tata Ruang		90.28	98.46	100	90.38		99.99		100
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Ditetapkan		33.34	16.67	50	50.01		33.33		66.65

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
1.03.12. 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							277,500,000		16,946,000	
1.03.12. 2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	100	1	277,500,000	0	16,946,000	0
1.03.12. 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							150,000,000		3,830,000	
1.03.12. 2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen				1	150,000,000	0	3,830,000	0
1.03.12. 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										
1.03.12. 2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen	1	1	100					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - c) Program Penataan Bangunan Gedung;
 - d) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
 - e) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - f) Program Pengembangan Jasa konstruksi
 - g) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - b) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum antara lain:
 - 1) Keterbatasan cakupan jaringan perpipaan air minum, terutama di wilayah perdesaan atau wilayah dengan kondisi geografis sulit;
 - 2) Kapasitas produksi dan distribusi air minum yang masih terbatas, sehingga belum mampu menjangkau seluruh rumah tangga;
 - 3) Belum optimalnya kualitas air minum yang memenuhi standar air minum aman, sehingga indikator akses air minum aman masih rendah;

- 4) Keterbatasan investasi dan pembiayaan pembangunan SPAM, baik untuk pembangunan instalasi maupun perluasan jaringan; dan
 - 5) Sebagian masyarakat masih menggunakan sumber air alternatif, seperti sumur atau mata air yang belum memenuhi standar keamanan air minum.
- b) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian program Penyelenggaraan Penataan Ruang antara lain:
- 1) Proses penyusunan RDTR membutuhkan tahapan teknis yang panjang, termasuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR;
 - 2) Fasilitasi dan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN memerlukan waktu yang cukup; dan
 - 3) Keterbatasan sumber daya teknis (SDM dan anggaran) dalam penyusunan dokumen rinci tata ruang.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:
- a) Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar air minum yang aman bagi masyarakat.
 - b) Risiko kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman masih relatif tinggi.
 - c) Cakupan layanan perpipaan perkotaan belum merata dan memerlukan investasi lanjutan.
 - d) Pemanfaatan infrastruktur SPAM belum optimal.
 - e) Pengendalian pemanfaatan ruang dan kepastian hukum tata ruang belum maksimal.
 - f) Potensi hambatan investasi dan perizinan berbasis tata ruang.
 - g) Risiko keterlambatan pencapaian target sasaran Renstra DPUPR 2025–2029.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- a) Meningkatkan cakupan layanan air minum aman melalui pengembangan dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
 - b) Memprioritaskan pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan pada wilayah yang belum terlayani secara optimal.

- c) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana air minum untuk mendukung pelayanan air siap minum perpipaan.
- d) Memperkuat koordinasi dengan PDAM dan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan layanan air minum.
- e) Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk program peningkatan akses air minum aman dan perpipaan.
- f) Mempercepat penyusunan dan penetapan RDTR pada kawasan prioritas pembangunan dan investasi.
- g) Meningkatkan sinkronisasi penyusunan RDTR dengan kebijakan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten.
- h) Memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan dalam proses penyusunan RDTR.
- i) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penyusunan dokumen teknis, data spasial, dan proses legalisasi RDTR.
- j) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program untuk memastikan pencapaian target kinerja sesuai Renstra.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian menunjukkan kinerja perangkat daerah berada pada kategori sangat baik dengan rata-rata capaian 97,83%. Kinerja pada bidang infrastruktur pekerjaan umum telah terlaksana optimal dan mendekati target yang ditetapkan, menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Penyelenggaraan penataan ruang juga menunjukkan kinerja baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target akibat kompleksitas proses perencanaan, regulasi, dan koordinasi lintas sektor. Sementara itu, kualitas tata kelola perangkat daerah memperlihatkan hasil sangat memuaskan, tercermin dari meningkatnya kepuasan masyarakat serta penguatan akuntabilitas kinerja organisasi. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Sasaran 1

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2029
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	%	55,79	62,12	61,00	98,20	65.21	61,00	93.54
Capaian Kinerja Sasaran				98,20					

Sumber : IKPD dan Data Pokok DPUPR Tahun 2025

Pengukuran kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dilakukan terhadap indikator persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum. Berdasarkan hasil evaluasi, target Tahun 2025 sebesar 62,12% dengan realisasi 61,00%, sehingga diperoleh capaian kinerja **98,20%**. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 55,79%, kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang mencerminkan perbaikan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum secara bertahap dan berkelanjutan.

Mengacu pada kriteria penilaian kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, capaian sebesar **98,20%** termasuk dalam kategori **“Sangat Tinggi”** (≥ 90%). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum telah efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar **65,21%**, realisasi Tahun 2025 telah mencapai **93,54%** dari target jangka menengah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur sudah berada pada jalur yang tepat (on track), namun tetap memerlukan optimalisasi

untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas layanan infrastruktur hingga akhir periode perencanaan.



2. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Sasaran 2

Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2029
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	%	53,43	61,81	57,56	93,13	95.34	57,56	60.37

Sasaran 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang							
No	Indikator	Satuan	Capaian	Tahun 2025		Renstra 2025-2029	
	Capaian Kinerja Sasaran			93,13			

Pengukuran kinerja Sasaran 2 Tahun 2025 dilakukan melalui indikator persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas. Target kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 61,81%, dengan realisasi sebesar 57,56%, sehingga capaian kinerja mencapai 93,13%. Dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 53,43%, terjadi peningkatan kinerja yang menunjukkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan penataan ruang, baik dari aspek perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian ruang.

Berdasarkan kriteria penilaian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, capaian sebesar **93,13%** termasuk kategori **“Sangat Tinggi”** (≥ 90%). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program penataan ruang telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, meskipun masih terdapat selisih terhadap target tahunan yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kinerja berikutnya.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar **95,34%**, realisasi Tahun 2025 baru mencapai **60,37%** dari target jangka menengah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penyelenggaraan penataan ruang sudah berada pada arah yang benar, namun masih memerlukan percepatan dan penguatan agar target akhir periode perencanaan dapat tercapai secara optimal.



3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.3.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Sasaran 3

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2029
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	%	85,60	85,65	85,98	100	85,85	85,98	100
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	73.75	73,80	75,80	100	74,00	75,80	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3				100					

Evaluasi pencapaian Sasaran 3 dilakukan terhadap dua indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Nilai AKIP Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian Sasaran 3 mencapai 100%, yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat optimal dalam peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 85,65% dengan realisasi 85,98%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 85,60, terjadi peningkatan yang menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan standar pelayanan, kemudahan akses, serta responsivitas terhadap kebutuhan pengguna layanan.

Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 73,80% dan terealisasi 75,80%, dengan capaian kinerja 100%. Realisasi tersebut melampaui target yang telah ditetapkan serta lebih tinggi dibanding capaian Tahun 2024 sebesar 73,75%, yang mengindikasikan semakin baiknya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya pada aspek perencanaan berbasis kinerja, pengukuran yang terarah, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan klasifikasi penilaian kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, capaian Sasaran 3 yang mencapai $\geq 90\%$ termasuk kategori **“Sangat Tinggi”**, sehingga dapat disimpulkan bahwa tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik telah dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029, kedua indikator telah mencapai **100%** dari target jangka menengah, sehingga menunjukkan bahwa pencapaian sasaran telah berada pada kondisi *on track* dan perlu dipertahankan melalui upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah ke depan, perlu dilakukan

penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara menyeluruh, terutama melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah. Hal ini dilakukan dengan memastikan keterkaitan yang jelas antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, serta penganggaran sehingga setiap pelaksanaan program benar-benar berorientasi pada pencapaian hasil (outcome).



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Indikator Kinerja Kunci. Adapaun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2 -2.5 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/ R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Pekerjaan Umum									
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)									
1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	26.63	31.13	35.62	19.23	19.35	62,15	Rendah
2	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89.5	89.85	90.19	87.90	86.14	95,87	Sangat Tinggi
3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	58.75	59.26	59.77	58.90	59.28	100	Sangat Tinggi
4	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	%	71.62	73.8	75.88	70.72	59.93	81,21	Tinggi
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	85.65	85.7	85.75	85.98	85.98	100	Sangat Tinggi
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	73.8	73.85	73.9	75.8	75.8	100	Sangat Tinggi
3	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Pekerjaan Umum	%	62.12	62.88	63.63	61.00	47.28	75.18	Tinggi
4	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas	%	61.81	70.2	78.58	57.56	66.66	94.96	Sangat Tinggi
INDIKATOR PROGRAM									
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	58.75	59.26	59.77	58.90	59.28	100	Sangat Tinggi
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari	%	100	100	100	100	0	0	Sangat Rendah
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	59.01	59.02	59.03	60.38	60.50	100	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/ R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	26.64	31.14	35.63	19.23	19.35	62.13	Rendah
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	26.63	31.13	35.62	19.23	19.35	62.15	Rendah
6	Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik	%	69.2	69.25	69.3	69.22	69.22	99.95	Sangat Tinggi
7	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80	80.25	80.5	86.94	86.94	100	Sangat Tinggi
8	Persentase Penerbitan PBG Dan SLF Terhadap Pengajuan PBG dan SLF Melalui SIMBG	%	64.24	64.64	65	57.95	68.29	100	Sangat Tinggi
9	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68.62	68.63	68.64	68.83	68.83	100	Sangat Tinggi
10	Persentase Ketersediaan Trotoar Terhadap Total Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	%	10.12	10.13	10.14	10.13	10.13	100	Sangat Tinggi
11	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89.5	89.85	90.19	87.90	86.14	95.87	Sangat Tinggi
12	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	94.36	94.37	94.38	92.58	91.10	96.53	Sangat Tinggi
13	Persentase Jalan dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan	%	22.59	22.62	22.64	22.73	22.73	100	Sangat Tinggi
14	Persentase Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	%	100	100	100	100	0	0	Sangat Rendah
15	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang	%	90.28	90.38	90.48	98.46	99.99	100	Sangat Tinggi
16	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Ditetapkan	%	33.34	50.01	66.68	16.67	33.33	66.65	Sedang
	JUMLAH IKUPD	4	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD					92.53	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/ R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	16	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					80.21	
	JUMLAH INDIKATOR DPUPR	20	RATA-RATA CAPAIAN DPUPR					86.37	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (SPM) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Pekerjaan Umum									
INDIKATOR SPM									
1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	0	0	Sangat Rendah
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	0	0	Sangat Rendah

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Pekerjaan Umum									
INDIKATOR IKK									
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	%				48,89	48,89		
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	%				87,90	87,90		
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%				86,18	86,18		
4	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	%				100	100		
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	%							Kabupaten Temanggung tidak terdapat pantai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
6	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	%				100	100		
7	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	%				100	100		
8	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%				100	100		
9	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	%				13,24	13,24		
10	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	%				92,18	92,18		
11	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	%				100	100		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.3.2
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan									
Bidang Urusan									
INDIKATOR IKK									
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	98,7	98,7	98,7				
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	96,67	96,87					
3	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	%	100	100	100				
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	89,5	89,65	89,8				
5	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100				
6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100				
7	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin	%	90,28	90,38	90,48				

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaian s.d tw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
	lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan								
8	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100				

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). IKU digunakan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, IKU ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antarwilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. IKU menjadi dasar dalam perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Adapun IKU DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 meliputi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah;
2. Nilai AKIP Perangkat Daerah;
3. Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Pekerjaan Umum; dan
4. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas.

Keempat indikator tersebut digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik, tingkat akuntabilitas kinerja, keberhasilan penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan, serta kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang menjadi mandat utama DPUPR Kabupaten Temanggung dalam mendukung pembangunan daerah.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Faktor Pendorong

- a) Tersedianya standar pelayanan dan prosedur pelayanan yang jelas bagi masyarakat.
- b) Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat.
- d) Kompetensi aparatur yang semakin baik melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM.
- e) Transparansi persyaratan, biaya, dan mekanisme pelayanan yang meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- f) Adanya tindak lanjut terhadap saran, masukan, dan pengaduan masyarakat sebagai upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Faktor Penghambat

- a) Waktu penyelesaian beberapa jenis pelayanan masih dipengaruhi oleh koordinasi dengan instansi atau pihak terkait lainnya.
- b) Sarana dan prasarana pelayanan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
- c) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan pelayanan masih beragam.
- d) Keterbatasan jumlah SDM pada beberapa layanan teknis yang memerlukan penanganan khusus.
- e) Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan, kemudahan, dan kualitas pelayanan publik.
- f) Belum optimalnya digitalisasi pada seluruh jenis layanan yang diberikan DPUPR.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur dan percepatan waktu pelayanan.
- b) Mengembangkan dan mengoptimalkan layanan berbasis elektronik untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat.
- c) Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan pelayanan prima.

- d) Melengkapi dan meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan publik.
- e) Memperkuat mekanisme pengelolaan pengaduan serta tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
- f) Melakukan evaluasi pelayanan secara berkala untuk mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan.
- g) Meningkatkan sosialisasi persyaratan dan prosedur pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai media informasi.

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Faktor Pendorong

- a) Adanya komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- b) Keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
- c) Penyusunan Perjanjian Kinerja, Renja, dan LKjIP yang semakin selaras dengan sasaran strategis perangkat daerah.
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar perbaikan kinerja.
- e) Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap manajemen kinerja dan implementasi SAKIP.
- f) Dukungan data dan informasi kinerja yang semakin baik dalam proses pengukuran dan pelaporan kinerja.

Faktor Penghambat

- a) Belum optimalnya kualitas pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact).
- b) Ketersediaan data pendukung beberapa indikator kinerja masih memerlukan koordinasi lintas bidang dan lintas instansi.
- c) Belum sepenuhnya terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
- d) Masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang memerlukan tindak lanjut secara bertahap.

- e) Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang perencanaan, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja.
- f) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan program.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a) Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP melalui penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja.
 - b) Menyempurnakan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
 - c) Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP.
 - d) Mengembangkan sistem informasi kinerja yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data dan pelaporan kinerja.
 - e) Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan terkait manajemen kinerja dan SAKIP.
 - f) Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran pada tahun berikutnya.
 - g) Memperkuat koordinasi antarbidang dalam penyediaan data dukung kinerja yang akurat, valid, dan tepat waktu.
3. Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan
Urusan Pekerjaan Umum
- #### Faktor Pendorong
- a) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur yang selaras dengan RPJMD dan Renstra DPUPR.
 - b) Dukungan anggaran daerah yang diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan konektivitas wilayah.

- c) Komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, drainase, air minum, dan bangunan gedung.
- d) Dukungan kelembagaan melalui keberadaan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di enam wilayah kerja yang mempercepat penanganan infrastruktur.
- e) Meningkatnya koordinasi antarbidang dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur.
- f) Partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam mendukung pemeliharaan serta pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun.

Faktor Penghambat

- a) Keterbatasan anggaran dibandingkan dengan kebutuhan penanganan infrastruktur yang terus meningkat.
- b) Masih rendahnya capaian akses rumah tangga terhadap air minum aman dan air siap minum perpipaan yang menjadi komponen pembentuk indikator.
- c) Belum optimalnya kondisi beberapa infrastruktur pendukung seperti drainase, trotoar, dan perlengkapan keselamatan jalan pada seluruh wilayah kabupaten.
- d) Kondisi geografis Kabupaten Temanggung yang berbukit dan rawan bencana sehingga meningkatkan biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
- e) Adanya kerusakan infrastruktur akibat faktor cuaca ekstrem dan tingginya intensitas penggunaan.
- f) Keterbatasan data dan kebutuhan pembaruan data infrastruktur secara berkala untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.
- g) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan infrastruktur.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a) Memprioritaskan alokasi anggaran pada infrastruktur yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan nilai indikator.

- b) Mempercepat pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk meningkatkan akses air minum aman dan layanan perpipaan.
- c) Meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya melalui pendekatan preventif dan rutin.
- d) Mengoptimalkan peran UPTD dalam pemantauan dan penanganan kerusakan infrastruktur secara cepat.
- e) Memperkuat pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi guna meningkatkan kualitas hasil pekerjaan.
- f) Mengembangkan sistem basis data infrastruktur yang terintegrasi dan mutakhir sebagai dasar perencanaan dan evaluasi.
- g) Mendorong pemanfaatan sumber pendanaan alternatif melalui bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan skema pendanaan lainnya.
- h) Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pencapaian target infrastruktur kewilayahan.

Indikator Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Pekerjaan Umum merupakan indikator utama yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur dasar daerah, meliputi jalan, jembatan, drainase, air minum, bangunan gedung, jasa konstruksi, keselamatan jalan, dan transportasi. Capaian indikator ini masih dipengaruhi oleh rendahnya beberapa komponen pembentuk, khususnya akses air minum aman, akses air siap minum perpipaan, dan pembinaan jasa konstruksi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan tahun berikutnya perlu difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar air minum serta optimalisasi kualitas infrastruktur pendukung untuk mempercepat pencapaian target Renstra DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029.

4. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas

Faktor Pendorong capaian kinerja sasaran ini antara lain:

- a) Tersedianya dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang, seperti RTRW dan RDTR.
- b) Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), rekomendasi teknis, dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- c) Meningkatnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemangku kepentingan dalam penyusunan maupun revisi dokumen tata ruang.
- d) Pemanfaatan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung pelayanan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang sehingga proses menjadi lebih efektif dan transparan.
- e) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Faktor Penghambat capaian kinerja indikator sasaran ini antara lain:

- a) Perubahan regulasi penataan ruang dari pemerintah pusat yang mengharuskan penyesuaian substansi dokumen tata ruang sehingga memperpanjang proses penyusunan maupun penetapan.
- b) Belum seluruh wilayah strategis memiliki RDTR sebagai dasar percepatan investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- c) Keterbatasan anggaran untuk penyusunan, revisi, dan pemutakhiran dokumen tata ruang serta pelaksanaan pengawasan di lapangan.
- d) Masih ditemukannya pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang akibat tingginya kebutuhan pembangunan dan perubahan penggunaan lahan.

- e) Keterbatasan data spasial yang mutakhir serta kapasitas sumber daya manusia di bidang penataan ruang.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a) Mempercepat penyusunan, revisi, dan penetapan RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan daerah.
- b) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, serta instansi terkait untuk mempercepat proses persetujuan substansi dokumen tata ruang.
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi geospasial dalam pelayanan perizinan, monitoring, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d) Meningkatkan intensitas pengawasan terhadap pemanfaatan ruang serta penegakan ketentuan terhadap pelanggaran tata ruang.
- e) Memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis penataan ruang dan pengelolaan data geospasial.

Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan.

B. INDIKATOR PROGRAM

1. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Kota

Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) merupakan ukuran kinerja pengelolaan sistem irigasi berdasarkan hasil penilaian terhadap lima aspek utama pengelolaan irigasi, yaitu kondisi fisik jaringan irigasi, produktivitas lahan, kelembagaan pengelolaan, dokumentasi dan pelaporan, serta kondisi sarana penunjang. Indeks ini digunakan untuk menilai tingkat keberfungsian dan efektivitas sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air irigasi bagi pertanian. IKSI menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas

pengelolaan jaringan irigasi kewenangan kabupaten/kota, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun operasionalnya.

Target tahun 2025 dapat dicapai karena ada beberapa hal yang mendukung peningkatan kinerja program pengelolaan sumber daya air antara lain:

- a. Konsistensi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi, sehingga kondisi fungsional sistem tetap terjaga.
- b. Prioritas rehabilitasi pada titik-titik kerusakan kritis, yang berdampak langsung terhadap peningkatan nilai indeks kinerja.
- c. Sinergi perencanaan dan penganggaran, sehingga kegiatan fisik dapat direalisasikan tepat waktu.
- d. Dukungan koordinasi antara bidang teknis dan pemangku kepentingan tingkat kecamatan/desa dalam menjaga keberlanjutan fungsi jaringan.

Sedangkan faktor penghambat capaian program pengelolaan sumber daya air, antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran dibandingkan dengan luas dan kompleksitas jaringan irigasi kewenangan kabupaten.
- b. Kerusakan akibat faktor alam (curah hujan tinggi, sedimentasi, dan longsor) yang mempengaruhi kondisi jaringan.
- c. Masih terdapat jaringan irigasi lama yang memerlukan rehabilitasi menyeluruh.
- d. Keterbatasan sumber daya teknis untuk monitoring berkala seluruh daerah irigasi.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Prioritas rehabilitasi jaringan irigasi dengan nilai indeks terendah;
- b. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data kondisi lapangan;
- c. Optimalisasi anggaran melalui skema pembiayaan terintegrasi (DAK, bantuan provinsi, dan sumber lainnya);
- d. Peningkatan peran serta petani dan P3A dalam pemeliharaan jaringan tersier;

e. Integrasi perencanaan SDA dengan ketahanan pangan daerah;

2. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari

Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari adalah indikator kinerja yang mengukur jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses terhadap air minum yang memenuhi syarat kesehatan secara layak, aman, dan tersedia setiap hari untuk kebutuhan dasar kehidupan, baik melalui layanan sistem penyediaan air minum (SPAM) maupun sumber air minum aman lainnya. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari merupakan jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Tujuan indikator ini untuk menilai pencapaian pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat atas air minum yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari antara lain:

- a. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan maupun non-perpipaan di wilayah perkotaan dan perdesaan.
- b. Adanya dukungan pendanaan dari APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta program bantuan pemerintah lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana air minum.
- c. Meningkatnya koordinasi antara pemerintah daerah, PDAM/BUMD Air Minum, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat dalam penyediaan layanan air minum.
- d. Bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan air minum yang layak dan aman untuk kesehatan.
- e. Optimalisasi pemanfaatan sumber mata air, sumur dalam, dan sumber air baku lainnya yang tersedia di wilayah pelayanan.

Beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian indikator ini meliputi:

- a. Keterbatasan ketersediaan sumber air baku, terutama pada musim kemarau dan di wilayah yang rawan kekeringan.
- b. Kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga meningkatkan biaya pembangunan dan operasional jaringan air minum.
- c. Belum meratanya cakupan pelayanan SPAM perpipaan, khususnya pada daerah terpencil dan kawasan dengan kepadatan penduduk rendah.
- d. Terbatasnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air minum dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan.
- e. Tingginya tingkat kehilangan air (non-revenue water/NRW) pada jaringan distribusi yang menyebabkan layanan belum optimal.
- f. Kerusakan sarana dan prasarana air minum akibat usia infrastruktur maupun faktor bencana alam.

Untuk meningkatkan capaian indikator jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan pembangunan, perluasan, dan peningkatan kapasitas SPAM perpipaan maupun non-perpipaan pada wilayah yang belum terlayani.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber air baku yang berkelanjutan melalui kegiatan konservasi daerah tangkapan air dan perlindungan mata air.
- c. Meningkatkan sinergi pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur air minum.
- d. Melaksanakan program penurunan tingkat kehilangan air melalui rehabilitasi jaringan distribusi dan peningkatan manajemen operasional.
- e. Memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyedia layanan air minum agar kualitas dan kontinuitas pelayanan tetap terjaga.

- f. Mendorong peningkatan akses air minum aman melalui edukasi masyarakat, pengawasan kualitas air, serta pengembangan teknologi pengolahan air yang sesuai dengan kondisi lokal.

3. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan adalah indikator yang mengukur proporsi rumah tangga yang memperoleh layanan air minum melalui sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh penyelenggara layanan air minum (misalnya PDAM atau unit penyedia air minum lainnya), dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga dalam suatu wilayah. Rumus perhitungan indikator:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan}}{\text{Total Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan adalah rumah tangga yang tersambung langsung ke jaringan pipa air minum dan menerima pasokan air yang memenuhi standar kualitas dan kontinuitas layanan sesuai regulasi. Total rumah tangga adalah keseluruhan rumah tangga yang tercatat dalam wilayah administrasi yang diukur.

Tujuan Indikator:

- a. Menilai tingkat pemerataan layanan air minum melalui jaringan perpipaan;
- b. Mengukur capaian pembangunan sistem penyediaan air minum yang aman, berkelanjutan, dan andal; dan
- c. Menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam sektor air minum.

Faktor-faktor yang mendukung peningkatan persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan antara lain:

- a) Adanya pembangunan dan perluasan jaringan distribusi air minum pada kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan.
- b) Dukungan pendanaan dari APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan program pemerintah lainnya untuk pembangunan SPAM.

- c) Meningkatnya kapasitas produksi instalasi pengolahan air dan ketersediaan sumber air baku yang memadai.
- d) Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- e) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat penggunaan air minum perpipaan yang lebih aman, mudah, dan berkelanjutan dibandingkan sumber air lainnya.
- f) Adanya sinergi antara pemerintah daerah, BUMD Air Minum, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pengembangan layanan air minum.

Beberapa kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator ini meliputi:

- a) Keterbatasan sumber air baku terutama pada musim kemarau atau wilayah yang memiliki potensi kekeringan.
- b) Belum meratanya jaringan perpipaan pada wilayah perdesaan, daerah pegunungan, dan kawasan terpencil.
- c) Tingginya biaya investasi pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah baru.
- d) Kapasitas produksi dan distribusi air minum yang masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat.
- e) Tingginya tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) akibat kebocoran jaringan dan kondisi infrastruktur yang sudah tua.
- f) Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang masih terbatas untuk membayar biaya pemasangan sambungan rumah maupun tarif layanan air minum.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini antara lain:

- a) Melanjutkan pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan pada wilayah yang belum terlayani, terutama kawasan perdesaan dan daerah dengan tingkat pelayanan rendah.
- b) Meningkatkan kapasitas produksi SPAM melalui pembangunan dan optimalisasi instalasi pengolahan air serta pengembangan sumber air baku baru.

- c) Mengalokasikan pendanaan secara berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sambungan rumah masyarakat.
- d) Melaksanakan rehabilitasi jaringan distribusi guna mengurangi tingkat kehilangan air dan meningkatkan kualitas pelayanan.
- e) Mengembangkan program bantuan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperluas akses layanan perpipaan.
- f) Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, BUMD Air Minum, pemerintah desa, dan pemerintah pusat dalam percepatan pencapaian target akses air minum perpipaan.
- g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap cakupan pelayanan, kualitas air, kontinuitas layanan, dan kepuasan pelanggan.

4. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman adalah indikator yang menggambarkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang memenuhi persyaratan kualitas air dan layanan secara berkelanjutan, baik dari sisi fisik, kualitas, maupun kontinuitas. Akses air minum aman mencakup sumber air minum yang:

- a) Terpenuhi kualitasnya sesuai standar kesehatan (bakteriologis, kimia, dan fisik);
- b) Tersedia dalam jumlah cukup dan berkelanjutan;
- c) Diperoleh dari sumber yang terlindungi seperti PDAM, sumur bor terlindungi, perpipaan pedesaan, atau sarana air bersih yang memenuhi standar; dan
- d) Dapat diakses secara layak, termasuk dari sisi jarak dan waktu pengambilan.

Indikator ini biasanya dihitung untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan air minum serta kontribusi terhadap target pembangunan, termasuk SDGs 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak). Rumus perhitungan :

$$\text{Persentase Akses Air Minum Aman} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Aman}}{\text{Total Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Tujuan indikator ini antara lain:

- 1) Mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar air minum masyarakat;
- 2) Menjadi dasar evaluasi penyediaan layanan air minum oleh pemerintah; dan
- 3) Mendukung perencanaan pembangunan sektor air minum yang berkelanjutan.

Faktor Pendorong capaian indikator persentase air minum aman antara lain:

- a. Peningkatan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan cara:
 - Pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan air minum.
 - Optimalisasi kapasitas instalasi pengolahan air dan reservoir.
 - Perluasan cakupan pelayanan PDAM/BUMD Air Minum.
- b. Ketersediaan Sumber Air Baku
 - Tersedianya sumber mata air, sungai, maupun air tanah yang memadai.
 - Upaya konservasi daerah tangkapan air dan perlindungan sumber air.
- c. Dukungan Kebijakan dan Pendanaan
 - Adanya program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait penyediaan air minum aman.
 - Dukungan pendanaan melalui APBN, APBD, DAK, dan sumber pembiayaan lainnya.
- d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
 - Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya konsumsi air minum yang aman dan sehat.
 - Perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- e. Kemajuan Teknologi Pengolahan Air
 - Pemanfaatan teknologi pengolahan dan pemantauan kualitas air yang lebih efektif.
 - Penggunaan sistem desinfeksi dan pengujian kualitas air secara berkala.

Faktor Penghambat capaian kinerja indikator persentase air minum aman antara lain:

a. Keterbatasan Jaringan Perpipaan

- Belum seluruh wilayah, terutama daerah perdesaan dan terpencil, terlayani jaringan air minum perpipaan.
- Biaya investasi pembangunan jaringan yang relatif besar.

b. Kualitas dan Kuantitas Sumber Air Menurun

- Degradasi lingkungan dan kerusakan daerah resapan air.
- Pencemaran sumber air oleh limbah domestik, pertanian, maupun industri.
- Dampak perubahan iklim yang memengaruhi ketersediaan air baku.

c. Keterbatasan Kapasitas Pengelola

- Kapasitas operasional dan keuangan penyelenggara SPAM yang belum optimal.
- Tingginya tingkat kehilangan air (non-revenue water/NRW).

d. Kondisi Geografis dan Sebaran Penduduk

- Topografi wilayah yang sulit dijangkau menyebabkan biaya pelayanan lebih tinggi.
- Sebaran penduduk yang tidak merata menyulitkan efisiensi pelayanan.

e. Rendahnya Kesadaran Sebagian Masyarakat

- Masih terdapat masyarakat yang menggunakan sumber air tidak terlindungi.
- Kurangnya perhatian terhadap kualitas air yang dikonsumsi.

Rekomendasi tindak lanjut dan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini:

a. Perluasan Cakupan Pelayanan Air Minum

- Memprioritaskan pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan pada wilayah dengan akses air minum aman yang masih rendah.
- Meningkatkan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

b. Penguatan Pengelolaan Sumber Air Baku

- Melaksanakan konservasi daerah tangkapan air dan perlindungan mata air.

- Mengendalikan pencemaran sumber air melalui pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan.
- c. Peningkatan Kinerja Penyelenggara SPAM
 - Mengurangi tingkat kehilangan air melalui rehabilitasi jaringan.
 - Meningkatkan kapasitas teknis, manajerial, dan keuangan pengelola SPAM.
- d. Penguatan Monitoring Kualitas Air
 - Melakukan pengujian kualitas air secara rutin sesuai standar kesehatan.
 - Mengembangkan sistem pemantauan kualitas air berbasis data dan teknologi informasi.
- e. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan air minum aman.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber air dan sarana air minum.

5. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan merupakan persentase rumah tangga di kawasan perkotaan yang memperoleh layanan air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi standar kualitas air siap minum sesuai ketentuan kesehatan, tersedia secara berkelanjutan, dan dapat langsung dikonsumsi atau memerlukan pengolahan minimal sebelum diminum. Indikator ini mencerminkan tingkat pelayanan dasar air minum perkotaan sekaligus kualitas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

1. Faktor Pendorong

a. Pengembangan Infrastruktur SPAM Perkotaan

- Pembangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir, dan jaringan distribusi.
- Penambahan sambungan rumah (SR) pada kawasan permukiman perkotaan.
- Rehabilitasi jaringan perpipaan untuk meningkatkan kontinuitas pelayanan.

b. Ketersediaan Sumber Air Baku yang Memadai

- Tersedianya sumber air baku yang cukup baik dari mata air, sungai, maupun sumber lainnya.
- Adanya upaya perlindungan dan konservasi daerah tangkapan air.

c. Dukungan Kebijakan dan Pendanaan Pemerintah

- Program pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan akses air minum perkotaan.
- Dukungan pembiayaan melalui APBN, APBD, DAK, hibah air minum, dan sumber pendanaan lainnya.

d. Meningkatnya Kebutuhan dan Kesadaran Masyarakat

- Pertumbuhan penduduk perkotaan yang meningkatkan kebutuhan layanan air perpipaan.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya air minum yang aman dan berkualitas.

e. Peningkatan Kinerja Penyelenggara SPAM

- Penguatan manajemen operasional dan pelayanan pelanggan.
- Penerapan teknologi pengolahan dan distribusi air yang lebih efisien.

Faktor Penghambat capaian kinerja indikator ini antara lain:

a. Keterbatasan Jaringan Perpipaan

- Belum seluruh kawasan perkotaan terjangkau jaringan distribusi air minum.
- Tingginya biaya pembangunan jaringan baru pada kawasan berkembang.

b. Tingginya Tingkat Kehilangan Air (Non-Revenue Water/NRW)

- Kebocoran jaringan distribusi yang menyebabkan kehilangan air.
- Sambungan ilegal dan ketidakakuratan pencatatan meter pelanggan.

c. Keterbatasan Kapasitas Produksi Air Minum

- Kapasitas instalasi pengolahan air belum mampu memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat.
- Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pengembangan layanan.

d. Penurunan Kualitas dan Ketersediaan Air Baku

- Pencemaran sungai dan sumber air oleh limbah domestik maupun industri.
- Dampak perubahan iklim yang memengaruhi debit sumber air.

e. Kemampuan Ekonomi Sebagian Masyarakat

- Biaya pemasangan sambungan rumah menjadi kendala bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
- Sebagian masyarakat masih memilih sumber air alternatif yang dianggap lebih murah.

Rekomendasi tindak lanjut dan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini:

a. Perluasan Jaringan Pelayanan Perpipaan

- Memprioritaskan pengembangan jaringan pada kawasan perkotaan yang belum terlayani.
- Meningkatkan jumlah sambungan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

b. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SPAM

- Menambah kapasitas instalasi pengolahan air minum sesuai proyeksi kebutuhan penduduk.
- Meningkatkan kualitas pengolahan agar air yang didistribusikan memenuhi standar air siap minum.

c. Pengurangan Tingkat Kehilangan Air

- Melaksanakan program deteksi dan perbaikan kebocoran jaringan.
- Modernisasi sistem pemantauan distribusi dan meterisasi pelanggan.

d. Pengamanan Sumber Air Baku

- Melaksanakan konservasi daerah tangkapan air dan perlindungan mata air.
- Mengendalikan pencemaran melalui pengawasan kualitas lingkungan secara berkala.

e. Penguatan Dukungan Pembiayaan dan Kemitraan

- Mengoptimalkan pemanfaatan APBN, APBD, DAK, dan skema pembiayaan lainnya.
- Mendorong kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam pengembangan SPAM.

f. Peningkatan Edukasi dan Pelayanan Pelanggan

- Meningkatkan sosialisasi manfaat penggunaan air perpipaan yang aman dan sehat.
- Memperkuat layanan pengaduan serta kepuasan pelanggan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan.

Indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM dalam menyediakan layanan air minum yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat perkotaan. Peningkatan indikator ini didorong oleh pengembangan infrastruktur, ketersediaan air baku, dan peningkatan kinerja pelayanan. Namun demikian, keterbatasan jaringan, tingginya kehilangan air, serta ancaman terhadap sumber air baku masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan cakupan layanan, peningkatan kapasitas SPAM, pengurangan kehilangan air, dan penguatan perlindungan sumber air guna mencapai target pelayanan air minum perkotaan yang optimal.

6. Persentase saluran drainase kondisi baik

Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik adalah perbandingan antara panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik terhadap total panjang saluran drainase yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dinyatakan dalam persentase. Saluran drainase dikategorikan dalam kondisi baik apabila mampu mengalirkan air sesuai kapasitas rencana, tidak mengalami kerusakan struktural yang signifikan, tidak terjadi penyumbatan, serta dapat mendukung pengendalian genangan dan banjir di wilayah pelayanan.

Faktor Pendorong capaian kinerja indikator ini:

a. Peningkatan Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase

- Pelaksanaan pembangunan saluran drainase baru pada kawasan yang belum terlayani.
- Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas saluran yang mengalami kerusakan.
- Penataan sistem drainase secara terpadu dengan pembangunan jalan dan kawasan permukiman.

b. Dukungan Pendanaan Infrastruktur

- Tersedianya anggaran APBD, APBN, DAK, maupun sumber pendanaan lainnya untuk pembangunan dan pemeliharaan drainase.
- Prioritas pemerintah daerah terhadap penanganan genangan dan banjir perkotaan.

c. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin

- Kegiatan pembersihan sedimentasi, sampah, dan vegetasi yang menghambat aliran air.
- Inspeksi berkala untuk mendeteksi kerusakan saluran sejak dini.

d. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

- Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran drainase.
- Berkurangnya kebiasaan membuang sampah ke saluran air.

e. Dukungan Perencanaan Tata Ruang

- Pengendalian pemanfaatan ruang yang memperhatikan sistem drainase kawasan.
- Penyediaan ruang terbuka hijau dan daerah resapan untuk mengurangi limpasan permukaan.

Faktor Penghambat capaian kinerja indikator ini:

a. Tingginya sedimentasi dan sampah

- Penumpukan sampah rumah tangga pada saluran drainase yang menghambat aliran air.
- Sedimentasi akibat erosi lahan dan material yang terbawa aliran permukaan.

b. Keterbatasan anggaran pemeliharaan

- Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan rutin seluruh jaringan drainase.
- Prioritas pembangunan baru yang lebih besar dibandingkan kegiatan pemeliharaan.

c. Alih fungsi lahan dan urbanisasi

- Meningkatnya kawasan terbangun yang mengurangi daerah resapan air.
- Bertambahnya debit limpasan air hujan yang melebihi kapasitas drainase eksisting.

d. Kerusakan infrastruktur drainase

- Saluran mengalami retak, amblas, runtuh, atau penyempitan akibat usia infrastruktur.
- Kerusakan akibat beban lalu lintas dan aktivitas pembangunan di sekitar saluran.

e. Kondisi curah hujan ekstrem

- Intensitas hujan yang tinggi dapat menyebabkan kapasitas saluran tidak mampu menampung debit air.
- Dampak perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrem.

f. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat

- Masih adanya praktik pembuangan sampah dan limbah ke saluran drainase.
- Pemanfaatan sempadan drainase yang mengganggu fungsi saluran.

Rekomendasi tindak lanjut dan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini:

a. Meningkatkan program pemeliharaan rutin

- Melaksanakan pembersihan saluran secara berkala terutama sebelum musim hujan.
- Menyusun jadwal inspeksi dan pemeliharaan berbasis tingkat kerusakan dan risiko genangan.

b. Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas drainase

- Memprioritaskan perbaikan saluran yang rusak berat atau sering menimbulkan genangan.
- Menyesuaikan dimensi saluran dengan perkembangan kawasan dan proyeksi debit air.

c. Penguatan pengelolaan persampahan

- Meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah untuk mengurangi pembuangan ke saluran drainase.
- Melaksanakan kampanye kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

d. Pengembangan sistem drainase berkelanjutan

- Mendorong pembangunan sumur resapan, biopori, kolam retensi, dan ruang terbuka hijau.
- Mengintegrasikan konsep drainase berwawasan lingkungan dalam pembangunan kawasan.

e. Penguatan pengawasan pemanfaatan ruang

- Mengendalikan pembangunan yang berpotensi mengganggu fungsi drainase.
- Menertibkan bangunan atau aktivitas yang menutup maupun mempersempit saluran.

f. Peningkatan partisipasi masyarakat

- Melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong pemeliharaan saluran.
- Meningkatkan edukasi mengenai pentingnya fungsi drainase dalam pengendalian banjir dan kesehatan lingkungan.

Indikator Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga fungsi jaringan drainase untuk mengendalikan genangan dan banjir. Peningkatan indikator ini didukung oleh pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, pemeliharaan rutin, serta partisipasi masyarakat. Namun demikian, sedimentasi, sampah, keterbatasan anggaran pemeliharaan, alih fungsi lahan, dan curah hujan ekstrem masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan pemeliharaan, rehabilitasi saluran, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta penguatan pengendalian tata ruang guna menjaga dan meningkatkan kondisi drainase secara optimal.

7. Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik

Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik adalah indikator yang menggambarkan tingkat kualitas fisik bangunan gedung milik pemerintah yang berada dalam kondisi baik, layak fungsi, serta dapat digunakan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Gedung kondisi baik merupakan bangunan yang tidak mengalami kerusakan struktural maupun non-struktural signifikan dan hanya memerlukan pemeliharaan rutin. Tujuan pengukuran indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah dalam melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi aset bangunan gedung pemerintah sehingga tetap layak digunakan sesuai standar pelayanan.

Faktor pendorong capaian kinerja indikator ini;

a. Tersedianya anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi

- Dukungan APBD untuk kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan renovasi bangunan gedung.
- Adanya prioritas pemerintah daerah terhadap pengelolaan aset daerah.

b. Pengelolaan aset yang baik

- Tersedianya data inventarisasi dan kondisi bangunan yang akurat.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kondisi gedung secara berkala.

c. Penerapan manajemen pemeliharaan gedung

- Pelaksanaan pemeliharaan preventif dan korektif secara terjadwal.
- Adanya standar operasional pemeliharaan bangunan gedung pemerintah.

d. Kualitas perencanaan dan konstruksi

- Bangunan direncanakan sesuai standar teknis dan kebutuhan fungsi pelayanan.
- Penggunaan material konstruksi yang berkualitas dan tahan lama.

e. Kepatuhan terhadap Regulasi Bangunan Gedung

- Pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan ketentuan teknis lainnya.
- Pengawasan konstruksi yang sesuai dengan standar bangunan gedung negara.

Faktor penghambat capaian kinerja indikator ini:

a. Keterbatasan Anggaran Pemeliharaan

- Kebutuhan pemeliharaan yang lebih besar dibandingkan kemampuan anggaran daerah.
- Fokus anggaran pada pembangunan baru sehingga pemeliharaan belum optimal.

b. Usia Bangunan yang relatif tua

- Banyak gedung pemerintah yang telah berusia lama sehingga mengalami penurunan kualitas fisik.
- Kerusakan struktur, arsitektur, maupun utilitas bangunan akibat faktor usia.

- c. Kurangnya pemeliharaan berkala
 - Pemeliharaan sering dilakukan setelah terjadi kerusakan yang cukup berat.
 - Belum optimalnya penerapan pemeliharaan preventif.
- d. Kerusakan akibat faktor lingkungan
 - Pengaruh cuaca, curah hujan tinggi, kelembaban, maupun bencana alam yang mempercepat kerusakan bangunan.
 - Risiko gempa bumi pada wilayah tertentu yang memengaruhi kondisi struktur bangunan.
- e. Perubahan kebutuhan organisasi
 - Perubahan jumlah pegawai atau fungsi pelayanan yang menyebabkan kapasitas bangunan tidak lagi memadai.
 - Penambahan ruang secara tidak terencana yang dapat memengaruhi kualitas bangunan.
- f. Belum lengkapnya dokumen teknis bangunan
 - Sebagian bangunan belum memiliki dokumen teknis yang lengkap seperti gambar as-built drawing, PBG, maupun SLF.
 - Menyulitkan perencanaan rehabilitasi dan pengelolaan aset secara optimal.

Rekomendasi tindak lanjut

- a. Meningkatkan program pemeliharaan gedung
 - Menyusun dan melaksanakan program pemeliharaan rutin serta berkala secara konsisten.
 - Mengutamakan pemeliharaan preventif untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.
- b. Prioritas rehabilitasi bangunan rusak
 - Melakukan rehabilitasi terhadap gedung yang mengalami kerusakan sedang dan berat.
 - Menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi pelayanan publik.
- c. Penguatan manajemen aset daerah
 - Melakukan pendataan dan penilaian kondisi bangunan secara berkala.
 - Mengembangkan basis data aset gedung yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan.
 -

d. Pemenuhan standar bangunan gedung

- Mendorong seluruh gedung pemerintah memenuhi ketentuan PBG dan SLF.
- Melakukan audit teknis bangunan untuk memastikan keamanan dan kelayakan fungsi.

e. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan

- Memastikan pembangunan dan rehabilitasi gedung mengikuti standar teknis bangunan gedung negara.
- Memperkuat pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

f. Penyediaan anggaran yang memadai

- Mengalokasikan anggaran pemeliharaan secara proporsional sesuai kebutuhan kondisi bangunan.
- Mengintegrasikan rencana pemeliharaan gedung dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Indikator Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas dan kelayakan bangunan gedung sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pencapaian indikator ini didukung oleh ketersediaan anggaran, pengelolaan aset yang baik, serta pelaksanaan pemeliharaan yang terencana. Sementara itu, keterbatasan anggaran, usia bangunan yang tua, dan kurang optimalnya pemeliharaan berkala menjadi faktor utama yang dapat menurunkan kondisi gedung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen aset, peningkatan program pemeliharaan dan rehabilitasi, serta pemenuhan standar teknis bangunan guna menjaga keberlanjutan fungsi dan kualitas gedung pemerintah.

8. Persentase penerbitan PBG dan SLF terhadap pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG

Persentase Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap Pengajuan PBG dan SLF melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) merupakan perbandingan antara jumlah permohonan PBG dan SLF yang berhasil diterbitkan dengan jumlah permohonan yang diajukan melalui SIMBG dalam periode tertentu, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini

menggambarkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan gedung, kepatuhan terhadap regulasi bangunan gedung, serta kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan SIMBG.

Faktor Pendorong

a. Optimalisasi Implementasi SIMBG

- Sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik mempercepat proses pengajuan, verifikasi, dan penerbitan dokumen.
- Integrasi data dan proses perizinan meningkatkan efisiensi pelayanan.

b. Kompetensi SDM Pengelola dan Tim Profesi Ahli (TPA)

- Ketersediaan SDM teknis yang memahami regulasi bangunan gedung dan operasional SIMBG.
- Dukungan Tim Profesi Ahli dalam proses penilaian dokumen teknis bangunan.

c. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha

- Pemilik bangunan semakin memahami pentingnya legalitas bangunan melalui PBG dan SLF.
- Adanya kewajiban administrasi bangunan untuk mendukung investasi dan kepastian hukum.

d. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

- Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan peraturan turunannya terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
- Kebijakan penyederhanaan perizinan melalui sistem elektronik.

e. Koordinasi Antar Perangkat Daerah

- Dukungan OPD terkait dalam penyediaan data teknis, tata ruang, lingkungan, dan utilitas kawasan.
- Sinkronisasi proses pelayanan yang mempercepat penerbitan PBG dan SLF.

Faktor Penghambat capaian kinerja indikator ini antara lain:

a. Kelengkapan Dokumen Permohonan yang Belum Memadai

- Banyak permohonan yang belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.

- Dokumen gambar teknis dan perhitungan konstruksi sering memerlukan perbaikan atau revisi.
- b. Keterbatasan SDM Teknis
- Jumlah tenaga teknis dan operator SIMBG belum sebanding dengan jumlah permohonan yang masuk.
 - Beban kerja tinggi dapat memperpanjang waktu verifikasi dan evaluasi.
- c. Kendala Teknis Sistem SIMBG
- Gangguan jaringan internet atau sistem pusat SIMBG yang dapat menghambat proses pelayanan.
 - Sinkronisasi data dan pembaruan aplikasi yang terkadang menyebabkan keterlambatan proses.
- d. Rendahnya Pemahaman Pemohon
- Sebagian masyarakat dan pelaku usaha belum memahami prosedur pengajuan PBG dan SLF melalui SIMBG.
 - Kesalahan pengisian data dan unggah dokumen menyebabkan proses permohonan tertunda.
- e. Kompleksitas Bangunan Tertentu
- Bangunan dengan tingkat risiko menengah tinggi atau tinggi memerlukan proses evaluasi teknis yang lebih panjang.
 - Kebutuhan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari berbagai pihak memperpanjang proses penerbitan.
- f. Perubahan Regulasi
- Adanya perubahan kebijakan atau pedoman teknis dari pemerintah pusat yang memerlukan penyesuaian mekanisme pelayanan di daerah.
- Rekomendasi tindak lanjut dan upaya peningkatan capaian kinerja indikator ini:
- a. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan PBG dan SLF
- Melaksanakan pelatihan teknis SIMBG secara berkala bagi operator dan tenaga teknis.
 - Meningkatkan kompetensi aparatur dalam evaluasi dokumen bangunan gedung.
- b. Penguatan Pendampingan kepada Pemohon
- Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait tata cara pengajuan PBG dan SLF.

- Menyediakan layanan konsultasi teknis sebelum pengajuan permohonan.
- c. Optimalisasi Kinerja SIMBG
 - Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan digital dan jaringan internet.
 - Melakukan monitoring berkala terhadap kendala operasional sistem.
- d. Penyederhanaan dan Standardisasi Proses Pelayanan
 - Menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami.
 - Mengembangkan daftar periksa (checklist) persyaratan untuk mengurangi pengajuan yang tidak lengkap.
- e. Penguatan Koordinasi Antar Instansi
 - Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait tata ruang, lingkungan, dan infrastruktur.
 - Mempercepat proses pemberian rekomendasi teknis yang menjadi persyaratan penerbitan PBG dan SLF.
- f. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap jumlah permohonan, waktu penyelesaian, dan tingkat penerbitan PBG serta SLF.
 - Mengidentifikasi hambatan utama sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan.

9. Persentase Trotoar Kondisi Baik

Persentase Trotoar Kondisi Baik adalah perbandingan antara panjang trotoar yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai standar pelayanan terhadap total panjang trotoar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dinyatakan dalam persentase. Trotoar dikategorikan dalam kondisi baik apabila memiliki permukaan yang aman dan nyaman untuk pejalan kaki, tidak mengalami kerusakan signifikan, memiliki sistem drainase yang berfungsi, serta memenuhi aspek aksesibilitas bagi seluruh pengguna jalan termasuk penyandang disabilitas.

Faktor Pendorong

a. Pembangunan dan rehabilitasi trotoar

- Pelaksanaan pembangunan trotoar baru pada ruas jalan yang belum memiliki fasilitas pejalan kaki.
- Rehabilitasi dan peningkatan kualitas trotoar yang mengalami kerusakan.
- Integrasi pembangunan trotoar dalam program peningkatan jalan perkotaan.

b. Dukungan kebijakan transportasi berkelanjutan

- Kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan mobilitas non-motorized transport (NMT).
- Peningkatan perhatian terhadap keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

c. Ketersediaan Anggaran Infrastruktur

- Dukungan pendanaan dari APBD, APBN, maupun sumber pembiayaan lainnya untuk pembangunan dan pemeliharaan trotoar.
- Prioritas pembangunan kawasan perkotaan yang ramah pejalan kaki.

d. Kesadaran masyarakat terhadap ruang publik

- Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman.
- Dukungan masyarakat terhadap penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib.

e. Penguatan penataan kawasan perkotaan

- Pengembangan pusat kegiatan perkotaan yang mengedepankan aksesibilitas pejalan kaki.
- Integrasi trotoar dengan ruang terbuka publik dan fasilitas transportasi.

Faktor Penghambat

a. Keterbatasan anggaran pemeliharaan

- Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan trotoar secara berkala.
- Fokus pembangunan infrastruktur kendaraan bermotor yang lebih dominan dibandingkan fasilitas pejalan kaki.
-

- b. Kerusakan akibat faktor lingkungan dan usia infrastruktur
 - Kerusakan permukaan trotoar akibat genangan air, akar pohon, maupun faktor cuaca.
 - Penurunan kualitas material akibat usia konstruksi.
- c. Pemanfaatan trotoar yang tidak sesuai fungsi
 - Penggunaan trotoar sebagai area parkir kendaraan.
 - Pemanfaatan trotoar oleh pedagang kaki lima atau aktivitas lain yang mengganggu fungsi pejalan kaki.
 - Penempatan utilitas yang mengurangi ruang gerak pejalan kaki.
- d. Belum terintegrasinya sistem drainase dan utilitas
 - Kerusakan trotoar akibat pekerjaan utilitas yang tidak diikuti pemulihan kondisi secara optimal.
 - Drainase yang tidak berfungsi menyebabkan genangan dan mempercepat kerusakan trotoar.
- e. Rendahnya Kesadaran Sebagian Pengguna Jalan
 - Kurangnya kepedulian terhadap pemeliharaan fasilitas pejalan kaki.
 - Masih adanya vandalisme atau tindakan yang merusak fasilitas trotoar.

Rekomendasi tindak lanjut

- a. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi trotoar
 - Melaksanakan inspeksi dan pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi trotoar.
 - Memprioritaskan rehabilitasi trotoar yang mengalami kerusakan sedang dan berat.
- b. Pengembangan trotoar sesuai standar teknis
 - Membangun trotoar yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas.
 - Menyediakan fasilitas pendukung seperti guiding block, ramp disabilitas, dan jalur penyeberangan yang aman.
 - Penertiban Pemanfaatan Trotoar
 - Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsi.
 - Mengendalikan parkir liar dan aktivitas yang mengganggu ruang pejalan kaki.
 - Integrasi dengan sistem drainase dan utilitas

- Memastikan pembangunan trotoar terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan.
 - Mengatur pekerjaan utilitas agar tidak merusak trotoar atau segera melakukan pemulihan pasca pekerjaan.
- e. Peningkatan partisipasi dan edukasi masyarakat
- Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya trotoar sebagai fasilitas keselamatan pejalan kaki.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melaporkan kerusakan trotoar.
- f. Penguatan perencanaan kawasan ramah pejalan kaki
- Mengintegrasikan pembangunan trotoar dalam dokumen tata ruang dan perencanaan transportasi daerah.
 - Mengembangkan kawasan perkotaan yang berorientasi pada pejalan kaki dan transportasi berkelanjutan.
10. Persentase ketersediaan trotoar terhadap total panjang jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten
- Persentase ketersediaan trotoar adalah ukuran tingkat penyediaan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar pada jaringan jalan menurut kewenangannya (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten). Indikator ini menunjukkan sejauh mana ruas jalan telah dilengkapi trotoar sebagai infrastruktur pendukung keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas pejalan kaki.
- Faktor Pendorong capaian kinerja indikator ini antara lain:
- a. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Ramah Pejalan Kaki
- Adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendorong penyediaan fasilitas pejalan kaki sebagai bagian dari sistem transportasi berkelanjutan.
 - Penerapan konsep kota layak huni (livable city) dan transportasi berkelanjutan.
- b. Pembangunan dan Peningkatan Jalan
- Kegiatan pembangunan jalan baru maupun peningkatan kapasitas jalan yang diikuti penyediaan trotoar.
 - Program penataan kawasan perkotaan yang mengintegrasikan fasilitas pejalan kaki.

c. Pertumbuhan Aktivitas Perkotaan

- Meningkatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan pelayanan publik yang membutuhkan akses pejalan kaki yang aman.
- Bertambahnya pusat kegiatan masyarakat yang memerlukan konektivitas pedestrian.

d. Dukungan Pendanaan Infrastruktur

- Tersedianya pendanaan dari APBN, APBD, DAK, maupun sumber pembiayaan lainnya.
- Adanya program pembangunan kawasan strategis yang mencakup pembangunan trotoar.

e. Peningkatan Kesadaran terhadap Keselamatan Jalan

- Meningkatnya perhatian terhadap keselamatan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki sebagai kelompok rentan.
- Dukungan masyarakat terhadap penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman.

Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran Pembangunan

- Pembangunan trotoar membutuhkan biaya yang cukup besar terutama pada ruas jalan eksisting yang memerlukan penyesuaian ruang milik jalan.
- Prioritas anggaran sering lebih difokuskan pada pembangunan badan jalan dan jembatan.

b. Keterbatasan Ruang Milik Jalan (Rumija)

- Banyak ruas jalan, terutama di kawasan perkotaan lama, memiliki lebar ruang milik jalan yang terbatas.
- Kepadatan bangunan di sepanjang koridor jalan menyulitkan pembangunan trotoar.

c. Belum Meratanya Penyediaan Trotoar

- Trotoar umumnya hanya tersedia pada kawasan perkotaan dan pusat kegiatan tertentu.
- Ruas jalan di kawasan pinggiran dan perdesaan masih minim fasilitas pejalan kaki.

d. Koordinasi Antar Kewenangan Jalan

- Jalan nasional, provinsi, dan kabupaten memiliki kewenangan pengelolaan yang berbeda.

- Perbedaan prioritas pembangunan antar instansi dapat menghambat penyediaan trotoar secara terpadu.
- e. Pemanfaatan Ruang Jalan yang Tidak Tertib
- Keberadaan parkir liar, pedagang kaki lima, dan utilitas yang menempati ruang trotoar.
 - Penataan koridor jalan yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan fasilitas pedestrian.
- f. Rendahnya Prioritas terhadap Transportasi Non-Motorized
- Paradigma pembangunan yang masih berorientasi pada kendaraan bermotor.
 - Belum optimalnya integrasi trotoar dalam perencanaan transportasi wilayah.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan Pembangunan Trotoar pada Ruas Jalan Strategis
- Memprioritaskan pembangunan trotoar pada kawasan pendidikan, perdagangan, perkantoran, permukiman, dan fasilitas publik.
 - Mengintegrasikan pembangunan trotoar dalam setiap proyek peningkatan jalan.
- b. Penguatan Perencanaan Infrastruktur Pejalan Kaki
- Menyusun rencana induk jaringan pejalan kaki yang terintegrasi dengan sistem transportasi daerah.
 - Menetapkan target peningkatan panjang trotoar secara bertahap dalam dokumen perencanaan daerah.
- c. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
- Menata koridor jalan untuk menyediakan ruang yang memadai bagi pejalan kaki.
 - Mengendalikan pemanfaatan ruang jalan yang menghambat pembangunan trotoar.
- d. Penguatan Koordinasi Antar Instansi
- Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pembangunan fasilitas pedestrian.
 - Menyelaraskan program pembangunan trotoar pada ruas jalan lintas kewenangan.

e. Penyediaan Trotoar yang Inklusif dan Berkelanjutan

- Membangun trotoar sesuai standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
- Mengintegrasikan trotoar dengan halte, terminal, ruang terbuka publik, dan fasilitas transportasi lainnya.

f. Peningkatan Pengawasan dan Pemeliharaan

- Menjaga fungsi trotoar melalui pengawasan pemanfaatan ruang pejalan kaki.
- Melaksanakan pemeliharaan rutin agar trotoar tetap dalam kondisi baik dan nyaman digunakan.

11. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota

Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota merupakan indikator kinerja di bidang infrastruktur jalan yang digunakan untuk menilai tingkat kemantapan jaringan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. Definisi persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota adalah persentase panjang jalan dengan kondisi permukaan mantap (baik dan sedang) terhadap total panjang jalan kabupaten/kota.

Faktor Pendorong

a. Peningkatan Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan

- Tersedianya pendanaan APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun sumber pembiayaan lainnya untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan.
- Prioritas pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Pelaksanaan Program Pemeliharaan Jalan yang Berkelanjutan

- Kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan yang dilaksanakan secara konsisten.
- Penanganan kerusakan sejak dini sehingga mencegah penurunan kondisi jalan yang lebih parah.

c. Dukungan Perencanaan dan Manajemen Aset Jalan

- Tersedianya data kondisi jalan yang akurat melalui survei dan sistem manajemen jalan.
- Penentuan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan fungsi jaringan jalan.

d. Peningkatan Konektivitas Wilayah

- Kebutuhan konektivitas antarwilayah, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan pertanian, perdagangan, dan pelayanan publik mendorong peningkatan kualitas jalan.
- Dukungan program pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan aksesibilitas.

e. Kemajuan Teknologi Konstruksi Jalan

- Penggunaan material dan metode konstruksi yang lebih berkualitas dan tahan terhadap beban lalu lintas.
- Pemanfaatan teknologi pemeliharaan jalan yang lebih efektif dan efisien.

Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran Penanganan Jalan

- Kebutuhan rehabilitasi dan peningkatan jalan sering kali lebih besar dibandingkan kemampuan pendanaan daerah.
- Tingginya biaya konstruksi dan pemeliharaan akibat kenaikan harga material.

b. Kerusakan Akibat Beban Kendaraan Berlebih (Overloading)

- Kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas jalan mempercepat kerusakan perkerasan.
- Pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang belum sepenuhnya optimal.

c. Pengaruh Kondisi Cuaca dan Lingkungan

- Curah hujan tinggi menyebabkan genangan, erosi bahu jalan, dan kerusakan struktur perkerasan.
- Sistem drainase jalan yang kurang optimal mempercepat penurunan kondisi jalan.

d. Bertambahnya Panjang Jalan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penambahan ruas jalan yang harus dikelola menyebabkan kebutuhan anggaran pemeliharaan semakin besar.
- Kemampuan penanganan tidak selalu sebanding dengan penambahan aset jalan.

e. Kerusakan Infrastruktur Pendukung

- Kerusakan drainase, talud, dan bangunan pelengkap jalan dapat memengaruhi kondisi perkerasan jalan.
- Penanganan jalan sering memerlukan penanganan infrastruktur pendukung secara bersamaan.

f. Keterbatasan Kapasitas Teknis dan Peralatan

- Keterbatasan sumber daya teknis maupun peralatan pemeliharaan jalan dapat menghambat penanganan kerusakan secara cepat.

Rekomendasi Tindak Lanjut

a. Meningkatkan Program Pemeliharaan Jalan

- Mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala untuk mempertahankan kondisi jalan yang sudah mantap.
- Melaksanakan penanganan cepat pada kerusakan ringan sebelum berkembang menjadi kerusakan berat.

b. Memprioritaskan Penanganan Ruas Jalan Strategis

- Mengutamakan ruas jalan yang mendukung konektivitas ekonomi, pelayanan publik, dan akses kawasan produktif.
- Menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan manfaat ekonomi.

c. Penguatan Sistem Manajemen Jalan

- Melakukan survei kondisi jalan secara berkala untuk menghasilkan data yang akurat.
- Mengembangkan sistem informasi manajemen jalan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

d. Peningkatan Kualitas Konstruksi dan Pengawasan

- Memastikan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi jalan memenuhi standar teknis yang berlaku.
- Memperkuat pengawasan mutu pekerjaan konstruksi.

e. Pengendalian Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL)

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan kendaraan angkutan barang.
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha angkutan mengenai dampak kendaraan berlebih terhadap umur jalan.

f. Perbaikan Sistem Drainase Jalan

- Mengintegrasikan pemeliharaan drainase dengan program pemeliharaan jalan.
- Menangani titik-titik genangan yang berpotensi mempercepat kerusakan perkerasan.

g. Optimalisasi Pendanaan Infrastruktur

- Mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan alternatif.

- Menyusun perencanaan kebutuhan anggaran berbasis kondisi riil jaringan jalan.

12. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik adalah perbandingan antara jumlah jembatan kabupaten yang berada dalam kondisi baik terhadap total jumlah jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dinyatakan dalam persentase. Jembatan dikategorikan dalam kondisi baik apabila struktur utama, bangunan atas, bangunan bawah, dan perlengkapan jembatan berfungsi dengan baik, aman digunakan, serta memenuhi persyaratan teknis sesuai standar yang berlaku.

Faktor Pendorong

- Ketersediaan Anggaran Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jembatan
 - Dukungan APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya untuk pemeliharaan, rehabilitasi, dan penggantian jembatan.
 - Prioritas pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah dalam kebijakan pembangunan daerah.
- Pelaksanaan Pemeliharaan Berkala
 - Kegiatan inspeksi rutin, pemeliharaan preventif, dan perbaikan kerusakan ringan secara berkala.
 - Penanganan dini terhadap kerusakan sehingga tidak berkembang menjadi kerusakan berat.
- Sistem Manajemen Aset Jembatan yang Baik
 - Tersedianya data inventarisasi dan kondisi jembatan yang akurat.
 - Pelaksanaan pemeriksaan kondisi jembatan secara berkala sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.
- Kualitas Konstruksi dan Material
 - Penggunaan material yang memenuhi standar teknis dan memiliki daya tahan yang baik.
 - Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai spesifikasi teknis.

e. Dukungan Konektivitas dan Mobilitas Wilayah

- Jembatan merupakan infrastruktur strategis yang mendukung aksesibilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa.
- Tingginya manfaat ekonomi dan sosial mendorong perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan jembatan.

Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran Infrastruktur

- Besarnya kebutuhan biaya rehabilitasi dan penggantian jembatan dibandingkan kemampuan anggaran daerah.
- Banyaknya aset infrastruktur yang harus dipelihara secara bersamaan.

b. Usia Jembatan yang Sudah Tua

- Penurunan kualitas struktur akibat umur layanan yang panjang.
- Meningkatnya kebutuhan rehabilitasi atau penggantian komponen jembatan.

c. Beban Lalu Lintas Berlebih

- Kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas desain jembatan mempercepat kerusakan struktur.
- Tingginya intensitas lalu lintas pada ruas jalan tertentu.

d. Pengaruh Bencana Alam dan Kondisi Lingkungan

- Banjir, longsor, erosi, dan gerusan sungai (scouring) dapat merusak fondasi maupun bangunan bawah jembatan.
- Curah hujan tinggi mempercepat degradasi komponen jembatan.

e. Keterbatasan Pemeliharaan Preventif

- Pemeliharaan sering dilakukan setelah kerusakan cukup parah.
- Keterbatasan tenaga teknis dan peralatan inspeksi.

f. Kerusakan Bangunan Pelengkap Jembatan

- Kerusakan sambungan siar muai, pagar pengaman, lantai jembatan, dan drainase dapat menurunkan tingkat pelayanan jembatan.
- Kurangnya perhatian terhadap komponen non-struktural.

Rekomendasi Tindak Lanjut

a. Meningkatkan Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala

- Melaksanakan inspeksi kondisi jembatan secara berkala.
- Menangani kerusakan ringan secepat mungkin untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

b. Memprioritaskan Rehabilitasi Jembatan yang Rusak

- Menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, fungsi strategis, dan risiko keselamatan.
- Melaksanakan rehabilitasi atau penggantian jembatan yang sudah tidak memenuhi standar teknis.

c. Penguatan Sistem Manajemen Jembatan

- Mengembangkan database kondisi jembatan yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala.
- Mengoptimalkan penggunaan hasil inspeksi dalam penyusunan program penanganan.

d. Pengendalian Kendaraan Bermuatan Berlebih

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
- Melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan mengenai dampak muatan berlebih terhadap umur jembatan.

e. Peningkatan Ketahanan Infrastruktur terhadap Bencana

- Memperkuat perlindungan fondasi dan bangunan bawah jembatan terhadap gerusan sungai.
- Mengintegrasikan aspek mitigasi bencana dalam perencanaan rehabilitasi maupun pembangunan jembatan.

f. Optimalisasi Pendanaan Infrastruktur

- Mengupayakan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya.
- Menyusun kebutuhan anggaran berbasis kondisi dan tingkat risiko aset jembatan.

g. Peningkatan Kapasitas SDM Teknis

- Melaksanakan pelatihan inspeksi dan pemeliharaan jembatan bagi tenaga teknis.
- Meningkatkan kemampuan identifikasi dini terhadap kerusakan struktural dan non-struktural.

13. Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan

Persentase Jalan dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan adalah perbandingan antara panjang jalan yang memiliki lebar perkerasan dan ruang manfaat jalan sesuai dengan standar teknis berdasarkan fungsi dan klasifikasi jalan terhadap total panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dinyatakan dalam persentase. Standar lebar jalan ditentukan berdasarkan fungsi jalan (arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan) untuk menjamin kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas.

Faktor Pendorong

a. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Jalan

- Pelaksanaan program pelebaran jalan pada ruas-ruas yang belum memenuhi standar.
- Peningkatan jalan seiring dengan perkembangan kawasan dan pertumbuhan lalu lintas.
- Integrasi pelebaran jalan dalam program pembangunan dan rehabilitasi jalan.

b. Dukungan Perencanaan Tata Ruang dan Jaringan Jalan

- Adanya dokumen tata ruang dan rencana jaringan jalan yang menjadi acuan pengembangan infrastruktur.
- Penetapan koridor prioritas yang mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

c. Ketersediaan Anggaran Infrastruktur

- Dukungan pendanaan dari APBD, APBN, maupun sumber pembiayaan lainnya untuk pembangunan dan peningkatan jalan.
- Prioritas pemerintah terhadap peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

d. Pertumbuhan Aktivitas Ekonomi dan Mobilitas Masyarakat

- Meningkatnya kebutuhan transportasi barang dan orang mendorong peningkatan kapasitas jalan.
- Berkembangnya kawasan permukiman, perdagangan, industri, dan pariwisata.

e. Dukungan Kebijakan Pengembangan Wilayah

- Program pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan aksesibilitas antarwilayah.
- Sinergi pembangunan jalan dengan pengembangan kawasan strategis daerah.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Ruang Milik Jalan (Rumija)

- Banyak ruas jalan lama dibangun dengan lebar yang tidak sesuai standar saat ini.
- Kepadatan bangunan di sepanjang koridor jalan menyulitkan pelebaran jalan.

b. Keterbatasan Anggaran

- Pelebaran jalan memerlukan biaya yang relatif besar, terutama jika disertai pembebasan lahan dan penataan utilitas.
- Kebutuhan peningkatan jalan sering lebih besar dibandingkan kemampuan pendanaan daerah.

c. Kendala Pengadaan Tanah

- Proses pembebasan lahan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.
- Potensi penolakan atau keberatan dari masyarakat terdampak.

d. Keberadaan Utilitas dan Bangunan Pendukung

- Jaringan listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, dan utilitas lainnya sering menjadi hambatan dalam pelebaran jalan.
- Relokasi utilitas memerlukan koordinasi lintas instansi dan tambahan biaya.

e. Pertumbuhan Kawasan yang Lebih Cepat dari Peningkatan Infrastruktur

- Perkembangan permukiman dan aktivitas ekonomi meningkatkan volume lalu lintas secara signifikan.
- Kapasitas jalan eksisting tidak lagi memadai untuk melayani kebutuhan transportasi.

f. Kondisi Topografi dan Lingkungan

- Wilayah dengan kondisi perbukitan, lereng, atau kawasan padat penduduk memiliki keterbatasan dalam pengembangan lebar jalan.
- Adanya sungai, jembatan, dan bangunan pelengkap jalan yang memerlukan penanganan khusus.

Rekomendasi Tindak Lanjut

a. Penyusunan Prioritas pelebaran Jalan

- Memprioritaskan ruas jalan dengan volume lalu lintas tinggi dan fungsi strategis.
- Menyusun tahapan peningkatan lebar jalan sesuai kemampuan pendanaan daerah.

b. Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

- Menjaga ruang milik jalan sesuai ketentuan dalam dokumen tata ruang.
- Mengendalikan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan agar tidak menghambat pengembangan jalan di masa depan.

c. Optimalisasi Pendanaan Infrastruktur

- Mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun sumber pembiayaan lainnya.
- Mengintegrasikan program pelebaran jalan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan.

d. Percepatan Pengadaan Tanah

- Menyusun rencana kebutuhan lahan secara bertahap dan terukur.
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur.

e. Penataan dan Relokasi Utilitas

- Meningkatkan koordinasi dengan penyedia layanan utilitas untuk mendukung pelebaran jalan.
- Menyiapkan rencana relokasi utilitas secara terpadu pada koridor prioritas.

f. Peningkatan Sistem Manajemen Jalan

- Melakukan pendataan dan evaluasi berkala terhadap kondisi geometrik jalan.
- Mengembangkan basis data jalan yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan peningkatan kapasitas.

g. Pengembangan Alternatif Manajemen Lalu Lintas

- Mengoptimalkan rekayasa lalu lintas pada ruas yang belum memungkinkan dilakukan pelebaran.
- Mengembangkan jaringan jalan alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas pada koridor utama.

14. Persentase lembaga jasa konstruksi yang dibina

Persentase Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina adalah perbandingan antara jumlah lembaga jasa konstruksi yang memperoleh pembinaan dari pemerintah daerah terhadap total lembaga jasa konstruksi yang terdaftar dan menjadi sasaran pembinaan dalam wilayah kabupaten/kota, dinyatakan dalam persentase. Pembinaan meliputi kegiatan sosialisasi regulasi, pelatihan, bimbingan teknis, peningkatan kompetensi, fasilitasi sertifikasi, penguatan kelembagaan, dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas, profesionalisme, daya saing, dan kepatuhan pelaku jasa konstruksi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor Pendorong

a. Dukungan Regulasi Jasa Konstruksi

- Adanya amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi.
- Kejelasan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembinaan sektor jasa konstruksi.

b. Komitmen Pemerintah Daerah

- Dukungan program dan kegiatan pembinaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.
- Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

c. Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pelaku Konstruksi

- Meningkatnya tuntutan kualitas pekerjaan konstruksi dan tata kelola proyek.
- Kebutuhan badan usaha dan tenaga kerja konstruksi terhadap informasi regulasi serta pengembangan kompetensi.

d. Dukungan Asosiasi dan Organisasi Profesi

- Keterlibatan asosiasi badan usaha dan profesi konstruksi dalam kegiatan pembinaan.
- Sinergi antara pemerintah daerah, asosiasi, dan lembaga sertifikasi profesi.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan secara daring maupun luring.
- Kemudahan penyebaran informasi terkait regulasi, sertifikasi, dan pengembangan usaha jasa konstruksi.

Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran Pembinaan

- Anggaran pembinaan yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh lembaga jasa konstruksi.
- Keterbatasan frekuensi pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis.

b. Banyaknya Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi

- Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang cukup banyak menyebabkan cakupan pembinaan belum optimal.
- Sebaran lokasi badan usaha yang luas menyulitkan pelaksanaan pembinaan secara merata.

c. Rendahnya Partisipasi Sebagian Pelaku Usaha

- Tidak semua badan usaha aktif mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- Sebagian pelaku usaha menganggap kegiatan pembinaan belum menjadi kebutuhan prioritas.

d. Perubahan Regulasi yang Dinamis

- Perubahan kebijakan dan sistem perizinan jasa konstruksi memerlukan penyesuaian yang cepat dari pelaku usaha.
- Kebutuhan sosialisasi regulasi baru yang berkelanjutan.

e. Keterbatasan SDM Pembina

- Jumlah tenaga teknis pembina jasa konstruksi yang terbatas.
- Keterbatasan kapasitas untuk melakukan pendampingan secara intensif kepada seluruh lembaga jasa konstruksi.

f. Ketidakterbaruan Data Pelaku Jasa Konstruksi

- Data badan usaha yang tidak aktif atau berubah status sering menyebabkan ketidaksesuaian data sasaran pembinaan.
- Kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan.

Rekomendasi Tindak Lanjut

a. Meningkatkan Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi

- Menyusun program pembinaan yang menjangkau lebih banyak badan usaha jasa konstruksi.
- Memanfaatkan metode pembelajaran daring untuk memperluas jangkauan peserta.

b. Penguatan Basis Data Jasa Konstruksi

- Melakukan pemutakhiran data badan usaha jasa konstruksi secara berkala.
- Mengembangkan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi yang terintegrasi.

c. Peningkatan Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi

- Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait regulasi, manajemen proyek, keselamatan konstruksi, dan pengadaan barang/jasa.
- Memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui sertifikasi.

d. Penguatan Kemitraan dengan Asosiasi dan Lembaga Profesi

- Meningkatkan kolaborasi dengan asosiasi badan usaha dan profesi konstruksi.
- Mendorong keterlibatan lembaga sertifikasi profesi dalam kegiatan pembinaan.

e. Optimalisasi Sosialisasi Regulasi

- Melakukan sosialisasi secara berkala terhadap perubahan regulasi jasa konstruksi.
- Menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh pelaku usaha.

f. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

- Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan.
- Mengukur dampak pembinaan terhadap peningkatan kapasitas dan kepatuhan badan usaha jasa konstruksi.

g. Peningkatan Alokasi Sumber Daya Pembinaan

- Mengoptimalkan dukungan anggaran dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembinaan.
- Mengembangkan pola pembinaan berbasis kebutuhan dan karakteristik pelaku jasa konstruksi di daerah.

15. Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan tata ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Tahun 2024-2044, definisi pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya sesuai. Ruang Lingkup RTRW Kabupaten Temanggung meliputi Ruang Lingkup Materi dan Wilayah Perencanaan.

Faktor Pendorong

a. Ketersediaan Dokumen Tata Ruang yang Legal dan Mutakhir

Adanya RTRW Kabupaten dan RDTR yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

b. Implementasi Sistem Informasi Tata Ruang Digital

Pemanfaatan aplikasi GIS, SIMBG, OSS-RBA, dan sistem informasi geospasial mempermudah proses verifikasi kesesuaian lokasi pembangunan dengan rencana tata ruang.

c. Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Sinergi antara DPUPR, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, BPN, kecamatan, dan pemerintah desa membantu memastikan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan tata ruang.

d. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perizinan dan kesesuaian tata ruang mendorong peningkatan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang berlaku.

e. Dukungan Regulasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Keberadaan regulasi mengenai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) memperkuat mekanisme pengendalian pembangunan sesuai peruntukan ruang.

Faktor Penghambat capaian kinerja indikator ini:

a. Belum Lengkapnya Dokumen RDTR

Masih terdapat wilayah yang belum memiliki RDTR sehingga pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara lebih rinci dan operasional.

b. Perubahan Pemanfaatan Lahan yang Cepat

Perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, industri, dan fasilitas lainnya sering kali lebih cepat dibandingkan proses penyesuaian dokumen tata ruang.

c. Rendahnya Kepatuhan terhadap Ketentuan Tata Ruang

Masih ditemukan pembangunan bangunan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang akibat kurangnya pemahaman atau kepentingan ekonomi tertentu.

d. Keterbatasan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jumlah personel pengawas, sarana pendukung, dan anggaran pengendalian pemanfaatan ruang masih terbatas dibandingkan luas wilayah yang harus diawasi.

e. Ketidaksinkronan Data Spasial

Perbedaan data antara peta tata ruang, data pertanahan, dan kondisi lapangan dapat menyebabkan kesulitan dalam proses verifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang.

f. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat

Penyesuaian kebijakan dan regulasi terkait penataan ruang serta perizinan berusaha dapat mempengaruhi proses

penyusunan maupun implementasi pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.

Rekomendasi Tindak Lanjut

a. Percepatan Penyusunan dan Penetapan RDTR

Mendorong penyelesaian RDTR pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan sehingga pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan lebih efektif dan detail.

b. Penguatan Sistem Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui survei lapangan, pemanfaatan teknologi geospasial, serta pelaporan masyarakat.

c. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, investor, pemerintah desa, dan pelaku usaha mengenai ketentuan tata ruang serta konsekuensi pelanggarannya.

d. Integrasi Data Spasial dan Perizinan

Mengembangkan basis data geospasial yang terintegrasi dengan sistem perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan.

e. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, BPN, dan instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan penyelesaian konflik pemanfaatan lahan.

f. Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah

Melaksanakan tindakan administratif dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.

16. Persentase rencana detail tata ruang yang ditetapkan

Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang Ditetapkan merupakan indikator yang mengukur tingkat penyelesaian dan penetapan dokumen RDTR dibandingkan dengan jumlah RDTR yang direncanakan untuk disusun sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan instrumen

pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih rinci sebagai dasar perizinan berusaha, pengendalian pembangunan, dan investasi.

Faktor Pendorong

a. Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah

Penataan ruang menjadi salah satu prioritas nasional untuk mendukung kemudahan investasi dan percepatan pembangunan wilayah. Dukungan regulasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan dan penetapan RDTR.

b. Komitmen Pemerintah Daerah

Adanya dukungan kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah terkait menjadi faktor penting dalam penyediaan anggaran, sumber daya manusia, serta percepatan proses penetapan RDTR.

c. Kebutuhan Perizinan Berusaha Berbasis Tata Ruang

Implementasi sistem OSS-RBA membutuhkan RDTR sebagai dasar penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sehingga mendorong percepatan penyusunan dokumen RDTR.

d. Ketersediaan Data Geospasial

Dukungan peta dasar, data tematik, dan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) mempermudah proses penyusunan substansi teknis RDTR.

e. Dukungan Pendampingan Teknis

Fasilitasi dari Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi membantu pemerintah daerah dalam penyusunan, sinkronisasi, dan proses persetujuan substansi RDTR.

Faktor Penghambat

a. Kompleksitas Penyusunan Dokumen RDTR

Penyusunan RDTR memerlukan kajian teknis yang komprehensif, data spasial yang akurat, serta sinkronisasi dengan berbagai dokumen perencanaan sehingga membutuhkan waktu yang relatif panjang.

b. Perubahan Regulasi Penataan Ruang

Adanya perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat sering kali mengharuskan penyesuaian substansi RDTR

yang sedang disusun sehingga memperpanjang proses penyelesaiannya.

c. Keterbatasan Anggaran

Penyusunan RDTR membutuhkan biaya yang cukup besar untuk survei, penyusunan peta, konsultasi publik, digitalisasi, dan proses legalisasi dokumen.

d. Keterbatasan SDM Teknis

Jumlah tenaga perencana tata ruang dan tenaga geospasial yang terbatas dapat mempengaruhi kecepatan penyusunan dan penyempurnaan dokumen RDTR.

e. Proses Persetujuan Substansi yang Memerlukan Waktu

Tahapan harmonisasi, sinkronisasi lintas sektor, konsultasi publik, serta persetujuan substansi dari pemerintah pusat memerlukan proses administrasi yang cukup panjang.

f. Sinkronisasi Data dan Kepentingan Sektor

Perbedaan data maupun kepentingan antar sektor, seperti kehutanan, pertanian, permukiman, dan infrastruktur, sering menjadi kendala dalam penyusunan pola ruang dan struktur ruang yang disepakati bersama.

Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Percepatan Penyusunan RDTR Prioritas

Memfokuskan penyusunan RDTR pada kawasan perkotaan, kawasan strategis, dan kawasan yang memiliki potensi investasi tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Melakukan koordinasi secara intensif selama proses penyusunan hingga persetujuan substansi guna mempercepat penyelesaian dokumen.

3. Peningkatan Kualitas Data Geospasial

Melakukan pembaruan dan integrasi data spasial secara berkala agar penyusunan RDTR lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan.

4. Pengembangan Kompetensi SDM

Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan penataan ruang, teknologi geospasial, dan pemanfaatan aplikasi penyusunan RDTR digital.

5. Optimalisasi Dukungan Anggaran

Mengalokasikan anggaran secara memadai dan memanfaatkan program bantuan teknis dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan penyusunan RDTR.

6. Integrasi RDTR dengan Sistem Perizinan

Memastikan RDTR yang telah ditetapkan segera terintegrasi dengan sistem OSS-RBA sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pelayanan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

C. INDIKATOR SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Pekerjaan Umum merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada tingkat kabupaten/kota, SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;

Pelayanan dasar ini ditujukan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh akses terhadap air minum yang memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah yang cukup, kualitas yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Indikator penerima layanan:

Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Bentuk pelayanan meliputi:

- a. Penyediaan akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan.
- b. Penyediaan akses air minum melalui SPAM nonperpipaan terlindungi.
- c. Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana air minum.
- d. Perlindungan dan pengelolaan sumber air baku.

Tujuan:

- a. Meningkatkan akses air minum layak dan aman.
- b. Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- c. Mengurangi risiko penyakit akibat kualitas air yang buruk.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pelayanan dasar ini bertujuan menjamin masyarakat memperoleh akses terhadap pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan.

Indikator penerima layanan:

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Bentuk pelayanan:

- a. Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S).
- b. Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).
- c. Pembangunan dan rehabilitasi sarana sanitasi.
- d. Pengelolaan lumpur tinja dan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.

Tujuan:

- a. Mengurangi pencemaran lingkungan.
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- c. Mendukung terwujudnya permukiman yang sehat dan berkelanjutan.
- d. Sasaran SPM Bidang Pekerjaan Umum

Sasaran SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah seluruh warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar, khususnya:

- a. Masyarakat yang belum memiliki akses air minum layak dan aman.
- b. Masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi dan pengolahan air limbah domestik yang layak.

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPUPR melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan akses air minum dan sanitasi, antara lain:

- 1) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- 2) Peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan.

- 3) Pembangunan dan rehabilitasi sarana air minum perdesaan.
- 4) Pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat.
- 5) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
- 6) Edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi.

Pelaksanaan SPM tersebut diarahkan untuk mencapai target akses universal pelayanan dasar bidang pekerjaan umum serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional di bidang infrastruktur dasar dan kesehatan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui menetapkan jenis pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dengan sasaran penerima layanan sebanyak 120 warga negara yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum. Pelayanan ini dilaksanakan melalui penyediaan akses air minum menggunakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi, dengan standar kuantitas pelayanan minimal sebesar 60 liter per orang per hari atau setara dengan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Target mutu layanan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 30 rumah tangga memperoleh akses air minum melalui jaringan perpipaan terlindungi.

Dalam rangka pencapaian target tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan anggaran sebesar Rp90.409.000,00 yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dilakukan secara berkelanjutan selama satu tahun anggaran dengan fokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang memenuhi standar kuantitas dan kualitas sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum.

Penyelenggaraan pelayanan dasar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup warga melalui penyediaan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Selain mendukung pencapaian target SPM,

pelayanan tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan serta pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dasar dan kesehatan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPRLPLH menyelenggarakan pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025. Sasaran pelayanan ditujukan kepada 259.866 warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Pelayanan ini dilaksanakan secara berkelanjutan selama satu tahun melalui pengembangan dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) guna mendukung peningkatan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan masyarakat.

Dari aspek kuantitas pelayanan, target yang ditetapkan adalah sebanyak 602 rumah memperoleh akses pelayanan pengolahan air limbah domestik. Standar kuantitas pelayanan mensyaratkan bahwa setiap rumah tangga memiliki minimal satu akses pelayanan pengolahan air limbah domestik yang memenuhi ketentuan teknis. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan anggaran sebesar Rp7.855.398.000,00 yang digunakan untuk pembangunan, pengembangan, dan peningkatan sarana prasarana sanitasi masyarakat.

Sementara itu, dari aspek kualitas pelayanan, indikator yang digunakan mengacu pada standar akses aman terhadap fasilitas sanitasi sesuai ketentuan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Penyelenggaraan pelayanan ini diharapkan mampu meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak, mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah domestik, serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Melalui pemenuhan target SPM ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor Pendorong

- 1) Tersedianya infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik perpipaan maupun nonperpipaan yang telah beroperasi di sejumlah wilayah Kabupaten Temanggung.
- 2) Adanya dukungan pendanaan dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan APBN untuk pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana air minum.
- 3) Ketersediaan sumber air baku yang berasal dari mata air, sungai, maupun sumber air lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan air minum masyarakat.
- 4) Komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum melalui program peningkatan akses air minum.
- 5) Dibentuknya tim khusus pendataan SPM untuk meningkatkan kualitas pengumpulan dan validasi data pelayanan air minum.

Faktor Penghambat

- 1) Belum tersedianya data yang memadai pada tahap pengumpulan data SPM, meliputi:
 - a) Data jumlah warga negara yang telah memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - b) Data asal unit air baku yang mencakup jenis sumber air baku, nama sumber air, lokasi unit air baku, dan kapasitas intake.
 - c) Data kapasitas unit produksi air minum dan idle capacity yang belum terdokumentasi secara lengkap.
 - d) Data unit pelayanan air minum secara menyeluruh, baik yang dikelola PDAM, UPTD, BUM Desa, maupun Kelompok Pengelola SPAM.
 - e) Data kondisi operasional unit pelayanan air minum yang belum terinventarisasi secara komprehensif.
- 2) Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan tata kelola SPAM, khususnya pada kelompok pengelola air minum berbasis masyarakat.
- 3) Terbatasnya pembiayaan untuk pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi sarana air minum.

- 4) Kondisi topografi Kabupaten Temanggung yang berbukit dan memiliki tingkat kemiringan lahan yang tinggi sehingga meningkatkan biaya pembangunan dan distribusi air minum.
- 5) Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan akibat keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- 1) Mengoptimalkan peran tim pendataan SPM untuk melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data penerima layanan air minum secara berkala dan terintegrasi.
- 2) Menyusun basis data SPAM yang memuat informasi sumber air baku, kapasitas intake, kapasitas produksi, idle capacity, kondisi jaringan, serta jumlah penerima manfaat.
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola SPAM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan pengelolaan sarana air minum berbasis masyarakat.
- 4) Mengusulkan pendanaan pembangunan dan peningkatan SPAM melalui DAK, APBN, bantuan provinsi, maupun sumber pembiayaan lainnya.
- 5) Mengembangkan teknologi dan sarana pendukung yang sesuai dengan kondisi topografi Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan efisiensi distribusi air minum.
- 6) Memperluas cakupan pelayanan air minum pada wilayah yang belum terlayani serta melakukan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana yang mengalami penurunan fungsi.
- 7) Meningkatkan koordinasi antara DPUPR, PDAM, pemerintah desa, dan kelompok pengelola SPAM dalam penyediaan data dan pengembangan pelayanan air minum.

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome) merupakan indikator kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 6 (enam) Urusan Pilihan. DPUPR menyelenggarakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan capaian pada tahun 2025 meliputi:

1. Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota menunjukkan tingkat capaian sebesar 48,89%.
2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjukkan tingkat capaian sebesar 87,90%.
3. Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota menunjukkan tingkat capaian sebesar 86,18%.
4. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
5. Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
6. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota tidak dapat dilaksanakan dikarenakan di Kabupaten Temanggung tidak mempunyai pantai.
7. Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%. Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat
8. berpenghasilan rendah menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
9. Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi menunjukkan tingkat tingkat capaian sebesar 100%.
10. Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota menunjukkan tingkat capaian sebesar 13,24%.

Penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Faktor Pendorong

- a. Tersedianya program rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi secara rutin.
- b. Dukungan pendanaan APBD, DAK, dan bantuan pemerintah pusat.
- c. Tingginya kebutuhan sektor pertanian terhadap ketersediaan air irigasi.
- d. Adanya inventarisasi dan pemetaan kondisi jaringan irigasi secara berkala.

Faktor Penghambat

- a. Sebagian jaringan irigasi telah berusia tua dan mengalami kerusakan fisik.
- b. Keterbatasan anggaran dibandingkan dengan luas dan jumlah jaringan yang harus ditangani.
- c. Kerusakan akibat bencana alam, longsor, banjir, dan sedimentasi saluran.
- d. Alih fungsi lahan dan gangguan pada daerah tangkapan air.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a. Memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan berat.
- b. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi.
- c. Mengoptimalkan sumber pembiayaan dari APBN, DAK, dan bantuan provinsi.
- d. Memperkuat peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan irigasi.

2. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Jaringan Irigasi

Faktor Pendorong

- a. Sebagian besar daerah irigasi telah terhubung dengan jaringan primer, sekunder, dan tersier.
- b. Adanya pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi secara berkelanjutan.

- c. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan kelompok petani.

Faktor Penghambat

- a. Masih terdapat daerah irigasi yang belum terlayani secara optimal.
- b. Penurunan debit air pada musim kemarau.
- c. Kerusakan bangunan irigasi yang mengurangi efektivitas distribusi air.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan cakupan pelayanan jaringan irigasi pada daerah yang belum terlayani.
- b. Melakukan rehabilitasi bangunan irigasi yang rusak.
- c. Mengembangkan sistem konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan air baku.

3. Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum melalui SPAM (86,18%)

Faktor Pendorong

- a. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan nonperpipaan.
- b. Dukungan program air minum dari APBD, APBN, dan DAK.
- c. Ketersediaan sumber air baku di beberapa wilayah.
- d. Komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum.

Faktor Penghambat

- a. Belum lengkapnya data penerima layanan dan data teknis SPAM.
- b. Keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi air minum.
- c. Kondisi topografi Kabupaten Temanggung yang berbukit.
- d. Keterbatasan pembiayaan pengembangan jaringan pelayanan.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a. Memperluas cakupan pelayanan SPAM pada wilayah yang belum terlayani.
- b. Menyusun basis data pelayanan air minum yang terintegrasi.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola SPAM.

- d. Mengoptimalkan pembiayaan melalui DAK, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
4. Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
- Faktor Pendorong
- a. Dukungan program sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik.
 - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi layak.
 - c. Adanya pembangunan SPALD-S dan sarana sanitasi berbasis masyarakat.
 - d. Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah.
- Faktor Penghambat
- a. Sebagian masyarakat masih menggunakan sistem sanitasi yang belum memenuhi standar.
 - b. Keterbatasan lahan untuk pembangunan sarana pengolahan air limbah.
 - c. Keterbatasan data dan monitoring kondisi sarana sanitasi eksisting.
- Rekomendasi Tindak Lanjut
- a. Meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pengelolaan SPALD.
 - b. Melakukan pendataan dan pemantauan sarana sanitasi secara berkala.
 - c. Meningkatkan edukasi masyarakat mengenai sanitasi aman.
 - d. Mengembangkan layanan lumpur tinja terjadwal.
5. Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir
- Faktor Pendorong
- a. Pembangunan dan pemeliharaan drainase, talud, dan bangunan pengendali banjir.
 - b. Normalisasi saluran drainase dan sungai.
 - c. Koordinasi lintas sektor dalam penanganan banjir.
- Faktor Penghambat
- a. Intensitas hujan yang semakin tinggi akibat perubahan iklim.

- b. Sedimentasi dan penyumbatan saluran drainase oleh sampah.
- c. Keterbatasan anggaran untuk penanganan seluruh titik rawan banjir.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan kapasitas drainase perkotaan dan kawasan permukiman.
- b. Melakukan pemeliharaan rutin saluran drainase.
- c. Mengembangkan sistem peringatan dini dan mitigasi banjir berbasis masyarakat.
- d. Memperkuat konservasi daerah resapan air.

6. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai

Faktor Pendorong

Tidak relevan untuk Kabupaten Temanggung karena tidak memiliki wilayah pantai.

Faktor Penghambat

Tidak terdapat kawasan pesisir yang menjadi kewenangan penanganan pemerintah daerah.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a. Indikator dapat dinyatakan Not Applicable (N/A) sesuai karakteristik wilayah Kabupaten Temanggung.
- b. Fokus pengelolaan risiko bencana diarahkan pada ancaman longsor, banjir, dan gerakan tanah yang lebih dominan di wilayah Kabupaten Temanggung.

7. Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Faktor Pendorong

- a. Implementasi sistem SIMBG yang mempermudah proses pelayanan PBG.
- b. Sosialisasi regulasi bangunan gedung kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- c. Koordinasi yang baik antara DPUPR dan DPMPSTSP.

Faktor Penghambat

- a. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami kewajiban pengurusan PBG.
- b. Keterbatasan tenaga teknis pemeriksa bangunan gedung.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan sosialisasi perizinan bangunan gedung.
 - b. Memperkuat pengawasan pembangunan tanpa PBG.
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara layanan PBG.
8. Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Faktor Pendorong

- a. Kebijakan kemudahan layanan bagi MBR.
- b. Pemanfaatan SIMBG yang mempercepat proses perizinan.
- c. Dukungan regulasi yang memberikan kemudahan akses layanan.

Faktor Penghambat

- a. Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap prosedur pengajuan PBG.
- b. Keterbatasan dokumen administrasi yang dimiliki pemohon.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a. Memperluas sosialisasi kepada kelompok MBR.
 - b. Memberikan pendampingan teknis dalam proses pengajuan PBG.
 - c. Meningkatkan integrasi layanan perizinan dengan pemerintah desa dan kecamatan.
9. Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Faktor Pendorong

- a. Adanya program pembinaan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
- b. Dukungan regulasi mengenai kewajiban sertifikasi kompetensi.
- c. Kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi.

Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan jumlah pelatihan dan uji kompetensi di daerah.
- b. Biaya sertifikasi yang relatif tinggi bagi sebagian tenaga kerja.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- a. Memperluas pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

- b. Memfasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
 - c. Meningkatkan pendataan tenaga konstruksi yang belum tersertifikasi.
10. Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berdasarkan KKPR yang Diterbitkan
- Faktor Pendorong
- a. Telah tersedianya RTRW Kabupaten Temanggung dan RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung.
 - b. Dukungan sistem OSS-RBA dan mekanisme penerbitan KKPR.
 - c. Adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Faktor Penghambat
- a. Masih terbatasnya jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang.
 - b. Keterbatasan SDM pengawas penataan ruang.
 - c. Belum tersedianya RDTR secara menyeluruh pada seluruh kawasan strategis.
 - d. Luas wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan kapasitas pengawasan yang tersedia.
- Rekomendasi Tindak Lanjut
- a. Meningkatkan frekuensi monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKPR.
 - b. Mempercepat penyusunan RDTR kawasan prioritas, termasuk Kawasan Perkotaan Parakan.
 - c. Mengembangkan sistem pengawasan berbasis geospasial.
 - d. Memperkuat koordinasi dengan DPMPTSP, pemerintah desa, dan instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan capaian IKK Outcome Tahun 2025, sebagian besar indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mencapai kinerja yang sangat baik, bahkan mencapai 100% pada beberapa indikator pelayanan dasar. Namun demikian, indikator kondisi irigasi (48,89%) dan penilaian pelaksanaan KKPR (13,24%) masih memerlukan perhatian

husus melalui peningkatan pembiayaan, penguatan pengawasan, percepatan penyusunan dokumen tata ruang, serta optimalisasi pemeliharaan infrastruktur guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dari 16 indikator program terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman

Capaian kinerja indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman 72,18%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Cakupan jaringan perpipaan masih terbatas, terutama pada wilayah perdesaan, daerah terpencil, dan kawasan dengan topografi sulit sehingga belum seluruh masyarakat memperoleh akses air minum aman.
- 2) Keterbatasan pendanaan pembangunan dan pengembangan SPAM, mengingat kebutuhan investasi infrastruktur air minum relatif besar dibandingkan kemampuan anggaran yang tersedia.
- 3) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air baku akibat kerusakan daerah tangkapan air, berkurangnya debit mata air saat musim kemarau, serta dampak perubahan iklim.
- 4) Pencemaran sumber air oleh limbah domestik, aktivitas pertanian, dan kegiatan lainnya yang berpotensi menurunkan kualitas air baku.
- 5) Kapasitas operasional penyelenggara SPAM belum optimal, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun kemampuan pembiayaan pengelolaan sistem.

- 6) Tingginya tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) akibat kebocoran jaringan dan kondisi infrastruktur yang sudah menua sehingga mengurangi efektivitas pelayanan.
 - 7) Kondisi geografis Kabupaten Temanggung yang berbukit dan bergelombang menyebabkan pembangunan dan distribusi layanan air minum memerlukan biaya lebih tinggi.
 - 8) Sebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan pelayanan air minum perpipaan pada beberapa wilayah menjadi kurang efisien secara teknis maupun ekonomis.
 - 9) Masih adanya masyarakat yang menggunakan sumber air tidak terlindungi, seperti mata air, sumur dangkal, atau sumber air lainnya yang belum memenuhi standar air minum aman.
 - 10) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya air minum aman masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air yang memenuhi standar kesehatan.
- b. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
- Capaian kinerja indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 72,21%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
- 1) Cakupan jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh kawasan perkotaan, terutama pada kawasan permukiman baru dan wilayah pinggiran kota.
 - 2) Kapasitas produksi dan distribusi air minum masih terbatas, sehingga belum mampu melayani seluruh kebutuhan pelanggan potensial.
 - 3) Tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) masih relatif tinggi akibat kebocoran jaringan dan faktor teknis lainnya.
 - 4) Kualitas dan ketersediaan air baku mengalami penurunan, terutama pada musim kemarau dan akibat tekanan lingkungan terhadap sumber air.
 - 5) Biaya pemasangan sambungan rumah masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
 - 6) Sebagian rumah tangga masih menggunakan sumber air alternatif, seperti sumur, mata air, atau air kemasan sehingga belum beralih ke layanan perpipaan.

- 7) Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan lebih cepat dibandingkan pengembangan jaringan pelayanan air minum.
 - 8) Keterbatasan pendanaan untuk perluasan jaringan dan peningkatan infrastruktur SPAM, sehingga pengembangan layanan dilakukan secara bertahap.
- c. Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang Ditetapkan
- Pada tahun 2025 capaian kinerja indikator Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang Ditetapkan sebesar 33,34% terealisasi sebesar 16,67% dengan capaian 49,99%. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi ini disebabkan oleh adanya dinamika regulasi dan proses harmonisasi substansi RDTR di tingkat pusat yang memerlukan penyesuaian dokumen, sehingga mempengaruhi capaian indikator meskipun kegiatan dan anggaran telah terealisasi secara optimal.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, antara lain :
 - 1) Keterbatasan Anggaran Pembangunan Infrastruktur
 - a) Kebutuhan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pendanaan daerah.
 - b) Belum seluruh usulan penanganan jalan, jembatan, irigasi, drainase, air minum, dan sanitasi dapat diakomodasi setiap tahun anggaran.
 - c) Ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih cukup tinggi.
 - 2) Kondisi Geografis Wilayah yang Menantang
 - a) Topografi Kabupaten Temanggung yang didominasi wilayah pegunungan dan perbukitan menyebabkan biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi lebih tinggi.
 - b) Tingginya risiko bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gerakan tanah yang berdampak pada kerusakan infrastruktur.
 - 3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Infrastruktur
 - a) Masih terdapat ruas jalan, jaringan irigasi, drainase, dan sarana air minum yang memerlukan rehabilitasi atau peningkatan kualitas.

- b) Belum seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan air minum aman dan sanitasi sesuai standar pelayanan minimal.
- 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- a) Jumlah tenaga teknis tertentu belum sebanding dengan kompleksitas dan cakupan tugas yang harus dilaksanakan.
 - b) Kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur di bidang teknik, penataan ruang, jasa konstruksi, dan teknologi informasi masih cukup tinggi.
 - c) Keterbatasan tenaga pengawas lapangan untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan infrastruktur.
- 5) Permasalahan Data dan Sistem Informasi
- a) Belum seluruh data infrastruktur, pelayanan dasar, dan aset terintegrasi dalam satu sistem informasi yang mutakhir.
 - b) Ketersediaan data pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator kinerja masih memerlukan penyempurnaan.
 - c) Pemutakhiran data spasial dan geospasial memerlukan dukungan sumber daya dan teknologi yang memadai.
- 6) Pengelolaan Sumber Daya Air
- a) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air baku akibat perubahan iklim, kerusakan daerah tangkapan air, dan pencemaran lingkungan.
 - b) Tingginya kebutuhan air untuk sektor domestik dan pertanian yang perlu diimbangi dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
- 7) Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- a) Belum seluruh wilayah strategis memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
 - b) Masih ditemukan pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang.
 - c) Keterbatasan pengawasan dan monitoring pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- 8) Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
- a) Cakupan pelayanan SPAM perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah.

- b) Tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) masih perlu ditekan.
 - c) Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan air minum aman dan sanitasi layak masih perlu ditingkatkan.
- 9) Dampak Perubahan Regulasi
- a) Adanya perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat memerlukan penyesuaian dokumen perencanaan, tata ruang, perizinan, dan pelaksanaan program.
 - b) Proses sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah membutuhkan waktu dan koordinasi yang intensif.
- 10) Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
- a) Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur umum masih perlu ditingkatkan.
 - b) Masih ditemukan perilaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur, seperti pembuangan sampah ke saluran drainase serta pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan.

Secara umum, tantangan utama yang dihadapi DPUPR Kabupaten Temanggung meliputi keterbatasan pendanaan, kondisi geografis yang kompleks, kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur, keterbatasan SDM, pengelolaan sumber daya air, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar air minum dan sanitasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan, optimalisasi sumber pendanaan, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan geospasial, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung tercapainya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya saing.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain:
 - a. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
 - 1) Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur kewilayahan.
 - 2) Terhambatnya peningkatan konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas masyarakat.

- 3) Belum meratanya akses air minum aman dan sanitasi layak bagi masyarakat.
 - 4) Menurunnya efektivitas dukungan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 5) Belum optimalnya produktivitas sektor pertanian akibat kondisi jaringan irigasi yang belum mantap.
 - 6) Meningkatnya potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
 - 7) Berkurangnya kualitas pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - 8) Meningkatnya kerentanan wilayah terhadap bencana banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan.
- b. Dampak terhadap Pencapaian Program Nasional
- 1) Menghambat pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum, khususnya air minum dan sanitasi.
 - 2) Memperlambat pencapaian target RPJMN 2025–2029 di bidang infrastruktur, sumber daya air, dan pelayanan dasar.
 - 3) Mengurangi kontribusi daerah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur berkelanjutan.
 - 4) Menghambat pencapaian target ketahanan pangan nasional akibat belum optimalnya layanan irigasi.
 - 5) Menurunkan efektivitas program pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
 - 6) Memperlambat peningkatan investasi akibat belum optimalnya penataan ruang dan kepastian pemanfaatan ruang.
 - 7) Menghambat pengembangan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan.
 - 8) Mengurangi efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik akibat keterbatasan data dan sistem informasi pendukung.
 - 9) Menghambat upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan air minum, sanitasi, dan drainase yang berkelanjutan.

- 10) Menurunkan kontribusi daerah terhadap pencapaian target pembangunan infrastruktur nasional yang berdaya saing dan inklusif.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung antara lain:
 - A. Tantangan
 - 1) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang terus meningkat.
 - 2) Kondisi geografis Kabupaten Temanggung yang didominasi wilayah perbukitan dan pegunungan sehingga meningkatkan tingkat kesulitan dan biaya pembangunan infrastruktur.
 - 3) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur yang berkualitas, cepat, dan merata.
 - 4) Masih adanya infrastruktur jalan, irigasi, drainase, air minum, dan sanitasi yang memerlukan peningkatan kualitas dan cakupan layanan.
 - 5) Dampak perubahan iklim yang meningkatkan risiko bencana banjir, longsor, kekeringan, dan kerusakan infrastruktur.
 - 6) Keterbatasan data, teknologi, dan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.
 - 7) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
 - 8) Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia teknis pada beberapa bidang pekerjaan.
 - 9) Tuntutan percepatan pelayanan perizinan bangunan gedung dan penataan ruang yang semakin tinggi.
 - 10) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air akibat perubahan tata guna lahan dan tekanan lingkungan.
 - B. Peluang
 - 1) Dukungan kebijakan pemerintah pusat melalui RPJMN 2025–2029, Program Strategis Nasional, dan berbagai skema pendanaan infrastruktur.

- 2) Tersedianya sumber pembiayaan alternatif seperti DAK, APBN, Bantuan Keuangan Provinsi, dan kerja sama pemerintah dengan berbagai pihak.
 - 3) Perkembangan teknologi informasi, sistem informasi geospasial, Building Information Modeling (BIM), dan digitalisasi layanan publik yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan.
 - 4) Telah ditetapkan RDTR Kawasan Perkotaan Temanggung sebagai instrumen pendukung investasi dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya infrastruktur yang berkualitas, sanitasi layak, dan air minum aman.
 - 6) Potensi pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.
 - 7) Dukungan regulasi yang mendorong percepatan pelayanan perizinan melalui OSS-RBA, SIMBG, dan sistem pelayanan berbasis elektronik.
 - 8) Peluang peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pendampingan teknis dari pemerintah pusat maupun provinsi.
 - 9) Potensi kolaborasi dengan pemerintah desa, masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
 - 10) Meningkatnya pemanfaatan data geospasial dan teknologi survei untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan efektif.
5. Formulasi isu-isu penting
- Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi DPUPR Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Kualitas dan Kemantapan Infrastruktur Kewilayahan
- Rekomendasi:
- a) Memprioritaskan peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, dan drainase pada kawasan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

- b) Mengoptimalkan penanganan infrastruktur berdasarkan tingkat kerusakan dan manfaat pelayanan kepada masyarakat.
 - c) Meningkatkan sinergi pendanaan melalui APBD, APBN, DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi.
- 2) Perluasan Akses Air Minum Aman dan Sanitasi Layak
- Rekomendasi:
- a) Memperluas cakupan pelayanan SPAM perpipaan dan nonperpipaan pada wilayah yang belum terlayani.
 - b) Meningkatkan kualitas layanan air minum aman dan pengelolaan air limbah domestik sesuai target SPM.
 - c) Mengoptimalkan pendataan dan pemutakhiran data penerima layanan air minum dan sanitasi.
- 3) Penguatan Ketahanan Infrastruktur terhadap Risiko Bencana dan Perubahan Iklim
- Rekomendasi:
- a) Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir, longsor, dan kekeringan.
 - b) Mengintegrasikan aspek mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan infrastruktur.
 - c) Mengembangkan sistem peringatan dini dan pengelolaan daerah resapan air.
- 4) Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi
- Rekomendasi:
- a) Memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan.
 - b) Melaksanakan konservasi sumber air dan daerah tangkapan air secara berkelanjutan.
 - c) Memperkuat peran kelembagaan petani dan kelompok pengelola irigasi.
- 5) Penguatan Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Rekomendasi:
- a) Mempercepat penyusunan RDTR pada kawasan prioritas dan kawasan strategis.
 - b) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan KKPR dan pemanfaatan ruang berbasis sistem informasi geospasial.
 - c) Mendorong pemanfaatan RDTR sebagai instrumen pendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan.

- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang
Rekomendasi:
- a) Mengoptimalkan pemanfaatan SIMBG dan OSS-RBA dalam pelayanan perizinan.
 - b) Meningkatkan kapasitas aparatur dan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
 - c) Memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait perizinan bangunan gedung dan tata ruang.
- 7) Penguatan Tata Kelola Data dan Sistem Informasi Infrastruktur
Rekomendasi:
- a) Mengembangkan sistem informasi infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis data spasial.
 - b) Meningkatkan kualitas data pendukung SPM, LPPD, LKjIP, dan indikator kinerja daerah.
 - c) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- 8) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Rekomendasi:
- a) Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan teknis, dan sertifikasi profesi.
 - b) Memperkuat kapasitas tenaga teknis bidang jalan, irigasi, air minum, sanitasi, bangunan gedung, dan penataan ruang.
 - c) Mendorong inovasi dan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan.
- 9) Optimalisasi Pendanaan dan Kemitraan Pembangunan Infrastruktur
Rekomendasi:
- a) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sumber pembiayaan lainnya.
 - b) Mengembangkan kolaborasi dengan pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
 - c) Menyusun prioritas pembangunan berdasarkan urgensi, manfaat, dan kemampuan pendanaan daerah.
- 10) Peningkatan Pelayanan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Rekomendasi:

- a) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi.
- b) Mendukung pengembangan sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan investasi melalui penyediaan infrastruktur yang memadai.
- c) Meningkatkan konektivitas antarwilayah guna memperkuat daya saing daerah.

Catatan Strategis

- 1) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan penetapan prioritas pembangunan yang lebih selektif dan berbasis manfaat.
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dan data geospasial perlu menjadi prioritas untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
- 3) Penguatan ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim dan bencana perlu menjadi perhatian utama mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Temanggung yang rentan terhadap longsor dan bencana hidrometeorologi.
- 4) Percepatan penyediaan air minum aman, sanitasi layak, peningkatan kondisi irigasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu menjadi fokus pembangunan guna mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Temanggung 2025–2029, SPM, RPJMN 2025–2029, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan hasil penelaahan terhadap aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRD melalui kegiatan reses maupun mekanisme penyerapan aspirasi lainnya. Pokir menjadi salah satu masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, setiap usulan Pokir harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029.

Dalam implementasinya, usulan Pokir diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Sekretariat DPRD dalam bentuk kamus usulan kegiatan. Selanjutnya dilakukan verifikasi secara berjenjang oleh Sekretariat DPRD, Bappeda, dan perangkat daerah terkait untuk memastikan bahwa usulan tersebut sesuai dengan urusan pemerintahan, sasaran pembangunan daerah, serta dapat dipetakan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah. Proses ini menjadi bagian penting untuk menjaga konsistensi antara aspirasi masyarakat, dokumen perencanaan, dan kemampuan keuangan daerah.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Temanggung, sebagian usulan Pokir DPRD yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, jembatan, drainase, irigasi, maupun sarana prasarana permukiman, tidak seluruhnya dilaksanakan melalui belanja langsung perangkat daerah. Sebagian usulan yang memenuhi kriteria dan ketentuan dapat diarahkan pelaksanaannya melalui mekanisme Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Bankeudes). Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah memberikan dukungan pendanaan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah.

Dalam pelaksanaan Bankeudes, DPUPR berperan sebagai perangkat daerah teknis yang bertanggung jawab melakukan verifikasi teknis terhadap usulan kegiatan, menyusun kebutuhan teknis dan pagu berdasarkan standar yang berlaku, memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah desa, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan teknis, spesifikasi pekerjaan, dan tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, meskipun kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui mekanisme bantuan keuangan, DPUPR tetap memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Keterkaitan antara Pokir DPRD dan Bankeudes menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD tidak secara otomatis menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan tersebut terlebih dahulu melalui proses penelaahan, verifikasi, dan penyelarasan dengan dokumen perencanaan daerah. Apabila telah

memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai prioritas, usulan dapat diakomodasi melalui program dan kegiatan DPUPR maupun melalui skema Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan, kebutuhan pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah. Dengan mekanisme tersebut, aspirasi masyarakat dapat diwujudkan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Temanggung.

Alur penyelenggaraan Pokir yang dilaksanakan melalui mekanisme Bankeudes secara umum meliputi: penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD, penyusunan Pokok Pikiran DPRD, penginputan usulan ke dalam SIPD, verifikasi oleh Sekretariat DPRD, Bappeda, dan perangkat daerah, penetapan usulan yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima Bankeudes, penganggaran dalam APBD, pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa, serta pembinaan, monitoring, dan evaluasi teknis oleh DPUPR sesuai dengan bidang kewenangannya. Secara rinci rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagai berikut:

Tabel 2.4
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Kondisi jalan desa dan jalan lingkungan permukiman mengalami kerusakan sehingga menghambat aksesibilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar.	DPUPR Kabupaten Temanggung	Program Penyelenggaraan Jalan
	Sebagian ruas jalan desa belum memiliki perkerasan yang memadai sehingga diperlukan pengerasan, betonisasi, pavingisasi maupun pengaspalan untuk meningkatkan kemantapan jalan.	DPUPR Kabupaten Temanggung	Program Penyelenggaraan Jalan
	Jalan lingkungan pada kawasan permukiman belum memenuhi standar pelayanan sehingga diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.	DPUPR Kabupaten Temanggung	Program Penyelenggaraan Jalan
	Kerusakan talud penahan tanah menyebabkan potensi longsor serta mengancam keselamatan jalan,	DPUPR Kabupaten Temanggung	Program Pengelolaan

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
	permukiman, dan lahan masyarakat.		Sumber Daya Air
	Belum tersedianya senderan atau pengaman tebing pada ruas jalan dan kawasan permukiman sehingga diperlukan pembangunan senderan untuk menjaga stabilitas lereng.	DPUPR Kabupaten Temanggung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
	Kerusakan talud dan senderan pada bantaran sungai mengakibatkan potensi erosi dan kerusakan infrastruktur di sekitarnya.	DPUPR Kabupaten Temanggung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
	Sistem drainase lingkungan belum berfungsi optimal sehingga masih terjadi genangan dan gangguan terhadap lingkungan permukiman.	DPUPR Kabupaten Temanggung	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Saluran drainase dan saluran air desa mengalami kerusakan sehingga menghambat kelancaran aliran air dan meningkatkan risiko banjir lokal.	DPUPR Kabupaten Temanggung	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Sebagian masyarakat belum memperoleh akses air bersih yang memadai, terutama pada wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.	DPUPR Kabupaten Temanggung	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Jaringan perpipaan air bersih belum menjangkau seluruh wilayah sehingga diperlukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan distribusi air minum.	DPUPR Kabupaten Temanggung	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Ketersediaan sarana penyediaan air bersih, seperti sumur bor dan fasilitas pendukung SPAM, masih terbatas sehingga diperlukan penambahan infrastruktur pelayanan air minum.	DPUPR Kabupaten Temanggung	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Saluran irigasi pada beberapa lokasi memerlukan pemeliharaan agar distribusi air untuk lahan pertanian tetap optimal.	DPUPR Kabupaten Temanggung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, 2026

Telaah Pokok Pikiran DPRD sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui anggota DPRD masih didominasi oleh permasalahan infrastruktur dasar, meliputi

kerusakan jalan desa dan jalan lingkungan, belum optimalnya sistem drainase, kerusakan talud dan senderan, terbatasnya akses terhadap air minum, serta kebutuhan peningkatan infrastruktur sumber daya air. Permasalahan tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, sehingga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah.

Sebagai tindak lanjut atas hasil telaah Pokok Pikiran DPRD, sebagian usulan infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Bankeudes). Pada Tahun Anggaran 2025, DPUPR memfasilitasi pelaksanaan Bankeudes pada 249 lokasi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp15.193.950.000. Hingga akhir tahun, sebanyak 215 lokasi atau 86,35% telah terealisasi dengan penyerapan anggaran mencapai Rp15.120.950.000 atau 99,52%, sedangkan 34 lokasi atau 13,65% belum dapat direalisasikan sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp73.000.000 atau 0,48% dari total pagu. Tingginya realisasi anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar usulan Pokok Pikiran DPRD yang diakomodasi melalui Bankeudes telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan Bankeudes tersebut menjadi salah satu instrumen dalam menjawab isu-isu strategis yang teridentifikasi pada Tabel 2.4, khususnya peningkatan kualitas jalan desa dan jalan lingkungan, pembangunan talud dan senderan, pengembangan sistem drainase, serta penyediaan sarana air minum. Dengan demikian, Pokok Pikiran DPRD tidak hanya menjadi masukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan DPUPR dalam mekanisme Bankeudes diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendukung pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Temanggung.

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan

program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Berdasarkan hasil telaah antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah, secara umum program dan kegiatan yang diusulkan telah selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan penyesuaian pagu anggaran karena kebutuhan riil di lapangan lebih besar dibandingkan pagu indikatif yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2027. Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pagu indikatif dan kebutuhan pendanaan. Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada rancangan awal hanya dialokasikan sebesar Rp240.000.000,00, sementara berdasarkan hasil analisis kebutuhan diperlukan anggaran sebesar Rp23.639.862.000,00 untuk mendukung pencapaian target kemantapan jalan kabupaten. Demikian pula kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan meningkat dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00, kegiatan Rekonstruksi Jalan memerlukan alokasi sebesar Rp7.368.601.000,00, dan Pelebaran Jalan Menuju Standar membutuhkan Rp7.591.455.000,00. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk meningkatkan kondisi jalan kabupaten, mempertahankan tingkat kemantapan jalan, serta mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya tambahan alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan sebesar Rp3.290.533.000,00, Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan sebesar Rp997.706.000,00, serta Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan sebesar Rp160.000.000,00 yang pada rancangan awal belum memperoleh alokasi anggaran. Penambahan tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan akses air minum aman, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta target peningkatan pelayanan air minum perpipaan.

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Kebutuhan pendanaan untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan meningkat dari Rp75.000.000,00 menjadi Rp1.783.000.000,00 dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan meningkat dari Rp1.250.000.000,00 menjadi Rp1.695.000.000,00. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan perhatian terhadap pengelolaan jaringan irigasi guna mendukung ketahanan pangan daerah dan peningkatan layanan irigasi bagi sektor pertanian.

4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota memerlukan penyesuaian yang cukup besar dari Rp200.000.000,00 menjadi Rp7.700.000.000,00. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung penataan kawasan strategis, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, serta penguatan identitas kawasan yang mendukung daya saing daerah.

5. Program Penataan Bangunan Gedung

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya alokasi anggaran sebesar Rp2.450.000.000,00 untuk kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah yang belum terakomodasi dalam rancangan awal. Kegiatan tersebut diperlukan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif dan sesuai standar teknis.

Secara keseluruhan, hasil telaah menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 telah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Namun demikian, terdapat kebutuhan penyesuaian pagu anggaran terutama pada sektor jalan, irigasi, air minum, bangunan gedung, dan penataan lingkungan untuk mengakomodasi kebutuhan riil pelayanan masyarakat serta mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan indikator kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, usulan hasil analisis kebutuhan perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rancangan RKPD Tahun 2027 sesuai kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					44.260.859.399	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					89.987.824.399	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					44.260.859.399	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					89.987.824.399	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					13.728.086.799	A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					13.903.086.799	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja					2.000.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja					2.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	2.000.000	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.336.850.573		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.336.850.573	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122	Orang/Bulan	12.336.850.573		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122	Orang/Bulan	12.336.850.573	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					140.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah					140.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Paket	30.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Paket	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	20.000.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	20.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	30.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	30.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	50.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					125.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	125.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					955.236.226		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.005.236.226	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	95.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	95.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	860.236.226		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	910.236.226	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					294.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					294.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit	269.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit	269.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51	Unit	25.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51	Unit	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					1.565.000.000
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					75.000.000
	Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Kab. Temanggung	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3	Unit	75.000.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun			0
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					1.490.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					3.743.000.000	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					75.000.000	
	Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Kab. Temanggung	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3	Unit	75.000.000	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun			0	REVIEW INSPEKTOR AT
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					3.668.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Temanggung	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,016	KM	50.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Temanggung	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	859,43	KM	1.250.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Kab. Temanggung	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara		KM	0
	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Kab. Temanggung	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	3	Lembaga	40.000.000
	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Kab. Temanggung	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1	Dokumen	150.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.137.706.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Temanggung	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,016	KM	1.783.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Temanggung	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	859,43	KM	1.695.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Kab. Temanggung	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara		KM	0	REVIEW INSPEKTOR AT
	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Kab. Temanggung	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	3	Lembaga	40.000.000	
	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Kab. Temanggung	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1	Dokumen	150.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					4.528.239.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota					1.137.706.000		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota					4.528.239.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5	Dokumen	80.000.000		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5	Dokumen	80.000.000	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Temanggung	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0	Liter/ Detik	0		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Temanggung	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1,5	Liter/ Detik	3.290.533.000	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Temanggung	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1,5	Liter/ Detik	997.706.000		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Temanggung	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1,5	Liter/ Detik	997.706.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Temanggung	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1	SR	60.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					0
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota					0
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Temanggung	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Dioptimalisasi		Unit	0
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					314.902.600

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Temanggung	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1	SR	160.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					0	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota					0	
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Temanggung	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Dioptimalisasi		Unit	0	REVIEW INSPEKTOR AT
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					314.902.600	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					314.902.600
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Temanggung	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		Sistem Drainase Perkotaan	0
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Temanggung	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	6	Sistem Drainase Perkotaan	314.902.600
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					260.000.000
	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					260.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					314.902.600	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Temanggung	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		Sistem Drainase Perkotaan	0	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Temanggung	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	6	Sistem Drainase Perkotaan	314.902.600	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					2.995.000.000	
	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					2.995.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuai kan	0	Bangunan Gedung	0		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuai kan	3	Bangunan Gedung	2.450.000.000	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Temanggung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui	80	Dokumen	75.000.000		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Temanggung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui	80	Dokumen	75.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	SIMBG Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1	Bangunan Gedung	185.000.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					200.000.000
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000
	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2	Kawasan	200.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					26.380.164.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					26.380.164.000
	Pengelolaan	Kab.	Jumlah	1	Dokumen	50.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	SIMBG Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1	Bangunan Gedung	470.000.000	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					7.700.000.000	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					7.700.000.000	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2	Kawasan	7.700.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					56.128.596.000	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					56.128.596.000	
	Pengelolaan	Kab.	Jumlah	1	Dokumen	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Leger Jalan	Temanggung	Dokumen Leger Jalan yang Dikelola					Leger Jalan	Temanggung	Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2	Dokumen	75.000.000		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2	Dokumen	75.000.000	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Temanggung	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	650,476	KM	200.000.000		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Temanggung	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	650,476	KM	200.000.000	
	Pelebaran Jembatan	Kab. Temanggung	Panjang jembatan yang dilebarkan	20	M	1.877.000.000		Pelebaran Jembatan	Kab. Temanggung	Panjang jembatan yang dilebarkan	20	M	2.883.426.000	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Temanggung	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	22	KM	1.460.000.000		Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Temanggung	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	22	KM	10.000.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Temanggung	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggar		KM	0		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Temanggung	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggar		KM	0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			aannya			
	Pembangunan Jalan	Kab. Temanggung	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan		KM	0
	Rehabilitasi Jalan	Kab. Temanggung	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,415	KM	22.518.164.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Temanggung	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		KM	0
	Rekonstruksi Jalan	Kab. Temanggung	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		KM	0
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Temanggung	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2	Jembatan	200.000.000
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Temanggung	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		KM	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					50.000.000
	Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					50.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			aannya				
	Pembangunan Jalan	Kab. Temanggung	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan		KM	0	
	Rehabilitasi Jalan	Kab. Temanggung	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,415	KM	23.639.862.000	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Temanggung	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,145	KM	4.120.252.000	
	Rekonstruksi Jalan	Kab. Temanggung	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,415	KM	7.368.601.000	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Temanggung	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2	Jembatan	200.000.000	
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Temanggung	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,661	KM	7.591.455.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					50.000.000	
	Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. Temanggung	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	30	Lembaga	50.000.000		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. Temanggung	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	30	Lembaga	50.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					625.000.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					625.000.000	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					300.000.000		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					300.000.000	
	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	300.000.000		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	300.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					175.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					175.000.000	
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	175.000.000		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	175.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah					150.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah					150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Kabupaten/Kota							Kabupaten/Kota						
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen	150.000.000		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen	150.000.000	
						44.260.859.399							89.987.824.399	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, 2026

Keterangan : sub kegiatan ditabel diatas yang berwarna merah hasil dari review Inspektorat Kabupaten Temanggung, untuk sub kegiatan tersebut ada di dalam SIPD akan tetapi kegiatan tersebut dilaksanakan oleh OPD yang memang mengampu kegiatan tersebut, yaitu OPD DPRKPLH, dan OPD Dinas Pertanian.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Temanggung

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				
1	Pembangunan Saluran Air Bersih Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung (M)	Kecamatan Temanggung	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1 Kegiatan	Musrenbang
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Pelebaran Jembatan				
2	Pelebaran Jembatan Kali Ngerancang Ruas Jalan Parakan - Wonosroyo (M)	Kecamatan Kedu	Panjang jembatan yang dilebarkan	1 Kegiatan	Musrenbang
3	Pelebaran Jembatan Kali Nglarangan Ruas Jalan Pare - Nguwet (M)	Kecamatan Kranggan	Panjang jembatan yang dilebarkan	1 Kegiatan	Musrenbang
4	Pelebaran Jembatan Kalisemen Ruas Jalan Pengilon - Wonosari (M)	Kecamatan Bulu	Panjang jembatan yang dilebarkan	1 Kegiatan	Musrenbang
	Rehabilitasi Jalan				
5	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Candirototo - Bandarejo (M)	Kecamatan Candirototo	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Kegiatan	Musrenbang
6	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Banjarsari - Kataan (M)	Kecamatan Ngadirejo	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Kegiatan	Musrenbang
	Pemeliharaan Berkala Jalan				
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Caturanom - Campuranom (M)	Kecamatan Bansari	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 Kegiatan	Musrenbang
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kebraman - Gemawang (M)	Kecamatan Gemawang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 Kegiatan	Musrenbang
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Caturanom - Glapansari (M)	Kecamatan Parakan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 Kegiatan	Musrenbang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Volume/ Besaran	Catatan
1	2	3	4	5	6
10	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Tlogomulyo - Delok (M)	Kecamatan Tlogomulyo	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 Kegiatan	Musrenbang
11	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Wonoboyo - Campurejo (M)	Kecamatan Wonoboyo	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 Kegiatan	Musrenbang
Rekonstruksi Jalan					
12	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Tleter - Wonokerso (M)	Kecamatan Pringsurat	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 Kegiatan	Musrenbang
Pelebaran Jalan Menuju Standar					
13	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Jalan Bejen - Ngalian (M)	Kecamatan Bejen	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 Kegiatan	Musrenbang
14	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Jalan Kranggan - Kaloran (M)	Kecamatan Kaloran	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 Kegiatan	Musrenbang
15	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Jalan Lempuyang - Tretep (M)	Kecamatan Tretep	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1 Kegiatan	Musrenbang

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, 2026

2.7. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2023-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	JAGA TEMAN	DPUPR	APBD	Sistem Informasi Jaringan Irigasi Temanggung	Sistem Informasi berbasis GIS yang dapat di akses secara digital dan mempercepat pelaporan kerusakan jaringan irigasi	Pengelolaan irigasi yang lebih efisien dan tepat sasaran	DPUPR / 2024-2025

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, 2026

2.8. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara II Lomba Kinerja Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DPUPR

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, 2026

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Temanggung merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Meskipun tidak secara langsung menjadi penanggung jawab target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, DPUPR memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kebijakan nasional melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan nasional, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

Dukungan tersebut diwujudkan melalui proses perencanaan daerah yang mengacu pada RPJMN, kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum, RPJMD Kabupaten Temanggung, serta dokumen perencanaan lainnya yang kemudian dijabarkan ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Melalui penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan dan lingkungan, serta penyelenggaraan penataan ruang, DPUPR berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas wilayah, dan pembangunan kawasan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, bentuk dukungan DPUPR Kabupaten Temanggung terhadap kebijakan nasional diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Program Prioritas Nasional maupun Program Prioritas Kabupaten Temanggung sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Dukungan Program Prioritas Nasional/Daerah

Program Prioritas Nasional/Daerah	Program/Kegiatan DPUPR Kabupaten Temanggung	Bentuk Dukungan terhadap Kebijakan Nasional	Keterangan
Peningkatan konektivitas wilayah dan ketahanan infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Preservasi, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jalan serta jembatan kabupaten untuk meningkatkan konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi	Mendukung SPM Bidang Jalan serta SDGs 9 dan SDGs 11.
Peningkatan akses air minum layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan	Pembangunan dan pengembangan jaringan SPAM untuk	Mendukung SPM Bidang Air Minum

Program Prioritas Nasional/Daerah	Program/Kegiatan DPUPR Kabupaten Temanggung	Bentuk Dukungan terhadap Kebijakan Nasional	Keterangan
	Air Minum (SPAM)	meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak bagi masyarakat.	serta SDGs 6.
Pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyusunan FS dan DED City Walk serta penataan kawasan perkotaan guna meningkatkan kualitas ruang publik, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.	Mendukung SDGs 11 dan SDGs 9.
Penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan pembangunan yang tertib, aman, dan berkelanjutan.	Mendukung SPM Bidang Penataan Ruang serta SDGs 11 dan SDGs 13.
Pengurangan risiko bencana	Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase (apabila terdapat dalam tabel evaluasi)	Peningkatan fungsi drainase dan infrastruktur pengendali banjir untuk mengurangi risiko genangan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana.	Mendukung SDGs 11 dan SDGs 13.

Berdasarkan tabel tersebut, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung telah selaras dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta program pendukung lainnya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, konektivitas wilayah, pelayanan dasar masyarakat, dan penataan ruang yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak hanya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya pada pelayanan jalan, penyediaan air minum, dan penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu, program-program tersebut turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), serta Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan DPUPR Kabupaten Temanggung menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing guna meningkatkan pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung 2025-2029 adalah “Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas” dengan sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum;
2. Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas;
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Mewujudkan Pemerataan Kualitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas			Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Dengan Kualitas Baik	%	76,91	80,76
	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Pekerjaan Umum	%	63,63	65,21
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	59,77	61,56
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	%	100	100
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	59,03	59,05
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	35,63	44,62
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	35,62	44,61
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Kondisi Baik	%	69,30	69,40
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	68,64	68,66
			Persentase ketersediaan Trotoar terhadap Total Panjang Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	%	10,14	10,16
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	80,50	81
			Persentase Penerbitan PBG dan SLF terhadap Pengajuan PBG dan SLF	%	65	65,84

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
			melalui SIMBG			
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	90,19	90,88
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	94,38	94,40
			Persentase Jalan dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan	%	22,64	22,69
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	%	100	100
	Sasaran 2: Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas		Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkualitas	%	78,58	95,34
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang	%	90,48	90,68
			Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Ditetapkan	%	66,68	100
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	85,75	85,85
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	73,90	74,00

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Rancangan Renja DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2027, rencana pembangunan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 9 program dengan total kebutuhan pendanaan sebesar Rp89.987.824.399,00, meningkat sebesar Rp45.726.965.000,00 dibandingkan pagu indikatif awal sebesar Rp44.260.859.399,00. Peningkatan pagu tersebut mencerminkan penambahan kebutuhan pendanaan untuk mendukung prioritas pembangunan infrastruktur daerah, khususnya pada sektor jalan, irigasi, air minum, bangunan gedung, dan penataan lingkungan.

1. Jumlah Program dan Kegiatan

Terdapat 9 program utama yang didukung oleh 31 kegiatan dan sub kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp13.903.086.799,00;
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp3.743.000.000,00;
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp4.528.239.000,00;
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar Rp314.902.600,00;
- 5) Program Penataan Bangunan Gedung sebesar Rp2.995.000.000,00;
- 6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebesar Rp7.700.000.000,00;
- 7) Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp56.128.596.000,00;
- 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar Rp50.000.000,00; dan

- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp625.000.000,00.

Program dengan kebutuhan anggaran terbesar adalah Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp56,13 miliar atau sekitar 62,37% dari total kebutuhan anggaran DPUPR Tahun 2027.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Penyebaran program dan kegiatan DPUPR Tahun 2027 bersifat menyeluruh (kabupaten-wide) dan tersebar pada seluruh wilayah Kabupaten Temanggung sesuai kewenangan daerah, dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Bidang Jalan dan Jembatan dilaksanakan pada ruas jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi, rekonstruksi, pemeliharaan jalan dan jembatan.
- b) Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi dilaksanakan pada daerah irigasi kewenangan kabupaten yang luasnya di bawah 1.000 hektare.
- c) Bidang Air Minum difokuskan pada pengembangan dan perluasan SPAM jaringan perpipaan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum aman.
- d) Bidang Drainase diarahkan pada kawasan perkotaan dan kawasan permukiman yang memerlukan peningkatan sistem drainase.
- e) Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan difokuskan pada bangunan strategis daerah serta kawasan prioritas penataan lingkungan.
- f) Bidang Penataan Ruang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Temanggung melalui penyusunan dan penetapan RDTR serta pengendalian pemanfaatan ruang.
- g) Bidang Jasa Konstruksi dilaksanakan secara kabupaten melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi.

3. Total Kebutuhan Dana dan Sumber Pendanaan

Total kebutuhan dana DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2027 sebesar Rp89.987.824.399,00, dengan proporsi program sebagai berikut:

- a) Program Penyelenggaraan Jalan: Rp56.128.596.000,00 (62,37%);

- b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Rp13.903.086.799,00 (15,45%);
- c) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya: Rp7.700.000.000,00 (8,56%);
- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM: Rp4.528.239.000,00 (5,03%);
- e) Program Pengelolaan SDA: Rp3.743.000.000,00 (4,16%);
- f) Program Penataan Bangunan Gedung: Rp2.995.000.000,00 (3,33%);
- g) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang: Rp625.000.000,00 (0,69%);
- h) Program Pengelolaan Drainase: Rp314.902.600,00 (0,35%); dan
- i) Program Pengembangan Jasa Konstruksi: Rp50.000.000,00 (0,06%).

Adapun sumber pendanaan program dan kegiatan direncanakan berasal dari:

1. APBD Kabupaten Temanggung sebagai sumber pendanaan utama.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas.
3. APBN melalui Kementerian PUPR pada kegiatan yang memenuhi kriteria dukungan pusat.
4. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan infrastruktur kewilayahan.
5. Sumber pendanaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Temanggung Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan dengan prioritas utama pada penyelenggaraan jalan, yang menyerap lebih dari 60% total kebutuhan anggaran. Selain itu, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan sumber daya air, penataan bangunan dan lingkungan, serta penataan ruang tetap menjadi prioritas untuk mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan peningkatan daya saing wilayah Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	Dins Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						89.987.824.399							56.619.736.976	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						89.987.824.399							56.619.736.976	
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA						13.903.086.799							12.020.620.641	
			Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %							100 %		
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000					Kab. Temanggung		1.500.000	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	2.000.000						7 Dokumen	1.500.000	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000							1.500.000	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	2.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		7 Dokumen	1.500.000	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.336.850.573					Kab. Temanggung		11.232.509.078	
			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/ Bulan	122 Orang/ Bulan	122 Orang/ Bulan	122 Orang/ Bulan	12.336.850.573						122 Orang/ Bulan	11.232.509.078	
	1.03.01. 2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.336.850.573								
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/ Bulan	122 Orang/ Bulan	122 Orang/ Bulan	122 Orang/ Bulan	12.336.850.573	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		122 Orang/ Bulan	11.232.509.078	DPUPR
	1.03.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						140.000.000					Kab. Temanggung		127.624.662	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	10.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	10.209.973	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	48 Paket	48 Paket	48 Paket	30.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				48 Paket	30.629.919	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	15.314.959	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	20.419.946	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	51.049.865	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01. 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000							10.209.973	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	10.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		12 Paket	10.209.973	DPUPR
	1.03.01. 2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000							30.629.919	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	48 Paket	48 Paket	48 Paket	30.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		48 Paket	30.629.919	DPUPR
	1.03.01. 2.06.0005	Penyediaan Barang dan Penggandaan						20.000.000							15.314.959	
		Tersedianya Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		12 Paket	15.314.959	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi					
	1.03.01. 2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.000.000							20.419.946	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		12 Laporan	20.419.946	DPUPR
	1.03.01. 2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000							51.049.865	
		Terlaksananya Penyelenggaraan RapaKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		12 Laporan	51.049.865	DPUPR
	1.03.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						125.000.000					Kab. Temanggung		0	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0	3 Unit	8 Unit	125.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01. 2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						125.000.000							0	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0	3 Unit	8 Unit	125.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		0	0	DPUPR
	1.03.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.005.236.226					Kab. Temanggung		452.860.918	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	91.889.757	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	910.236.226	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	360.971.161	
	1.03.01. 2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						95.000.000							91.889.757	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	95.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		12 Laporan	91.889.757	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01. 2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						910.236.226							360.971.161	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	910.236.226	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		12 Laporan	360.971.161	DPUPR
	1.03.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						294.000.000					Kab. Temanggung		206.125.983	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	52 Unit	48 Unit	48 Unit	269.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				48 Unit	200.000.000	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	57 Unit	51 Unit	51 Unit	25.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				51 Unit	6.125.983	
	1.03.01. 2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						269.000.000							200.000.000	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	48 Unit	52 Unit	48 Unit	48 Unit	269.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		48 Unit	200.000.000	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi					
	1.03.01. 2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000							6.125.983	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	57 Unit	51 Unit	51 Unit	25.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		51 Unit	6.125.983	DPUPR
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						3.743.000.000							3.107.749.603	
			Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	61,56 %	58,90 %	59,26 %	59,77 %							60,00 %		
	1.03.02. 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000					Kab. Temanggung		152.191.460	
			Jumlah Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	75.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Unit	152.191.460	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untukKonstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0	0	0	0	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0	0	
	1.03.02. 2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir						75.000.000							152.191.460	
		Terehabilitasinya Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	75.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur	Terwujudnya peningkatan kualitas		3 Unit	152.191.460	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										(DAU)	dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik				
	1.03.02. 2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untukKonstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	0	0	0	0	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)			Kab. Temanggung	0	0	DINTAN
	1.03.02. 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.668.000.000					Kab. Temanggung		2.955.558.143	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,016 KM	0,016 KM	0,016 KM	0,016 KM	1.783.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0,016 KM	152.191.460	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	859,43 KM	859,43 KM	859,43 KM	859,43 KM	1.695.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				859,43 KM	2.651.905.710	
			Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Diopera sikan dan Dipelihara	0	0	0	0	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0	0	
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	40.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Lembaga	101.460.973	
			Jumlah Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	50.000.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										(DAU)						
	1.03.02. 2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						1.783.000.000							152.191.460	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,016 KM	0,016 KM	0,016 KM	0,016 KM	1.783.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		0,016 KM	152.191.460	DPUPR
	1.03.02. 2.02.0014	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						1.695.000.000							2.651.905.710	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	859,43 KM	859,43 KM	859,43 KM	859,43 KM	1.695.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		859,43 KM	2.651.905.710	DPUPR
	1.03.02. 2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tanah														
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Diopera sikan dan Dipelihara	0	0	0	0	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0	0	DPRKPLH
	1.03.02. 2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi						40.000.000							101.460.973	
		Terfasilitasinya kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	40.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur	Terwujudnya peningkatan kualitas		3 Lembaga	101.460.973	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										(DAU)	dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik				
	1.03.02. 2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa						150.000.000							50.000.000	
		Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		1 Dokumen	50.000.000	DPUPR
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	44,61 %	19,23 %	31,13 %	35,62 %							40,12 %		
			Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	100 %	100 %	100 %	100 %							100 %		
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	44,62 %	19,23 %	31,14 %	35,63 %							40,13 %		
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	59,05 %	60,38 %	59,02 %	59,03 %							59,04 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota						4.528.239.000					Kab. Temanggung		279.017.676	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Dokumen	129.017.676	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0	1 SR	1,5 Liter/ Detik	1,5 Liter/ Detik	3.290.533.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0	0	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0	0	0	1,5 Liter/ Detik	997.706.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0	0	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	0	1 SR	160.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0	150.000.000	
	1.03.03. 2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						80.000.000							129.017.676	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		5 Dokumen	129.017.676	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03. 2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						3.290.533.000							0	
		Meningkatnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0	1 SR	1,5 Liter/ Detik	1,5 Liter/ Detik	3.290.533.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		0	0	DPUPR
	1.03.03. 2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						997.706.000							0	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0	0	0	1,5 Liter/Deti k	997.706.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		0	0	DPUPR
	1.03.03. 2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						160.000.000							150.000.000	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	0	1 SR	160.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna		0	150.000.000	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik				
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota														
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	0	0	0	0	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0	0	
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						0							0	
		Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	0	0	0	0	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0	0	DPRKPLH
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						314.902.600							1.103.895.386	
			Presentase Saluran Drainase Kondisi Baik	69,40 %	69,22 %	69,25 %	69,30 %							69,35 %		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota						314.902.600					Kab. Temanggung		1.103.895.386	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Sistem Drainase Perkotaan	698.051.494	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	314.902.600	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Sistem Drainase Perkotaan	405.843.892	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06. 2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase						0							698.051.494	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		1 Sistem Drainase Perkotaan	698.051.494	DPUPR
	1.03.06. 2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						314.902.600							405.843.892	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	314.902.600	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		6 Sistem Drainase Perkotaan	405.843.892	DPUPR
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						2.995.000.000							2.277.798.843	
			Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	81 %	86,94 %	80,25 %	80,50 %							80,75 %		
			Persentase Penerbitan PBG dan SLF Terhadap Pengajuan PBG dan SLF Melalui SIMBG	65,84 %	57,95 %	64,64 %	65 %							65,42 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08. 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						2.995.000.000					Kab. Temanggung		2.277.798.843	
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	2.450.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Bangunan Gedung	1.852.798.843	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan BangunanGedung melalui SIMBG	80 Dokumen	50 Dokumen	80 Dokumen	80 Dokumen	75.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				80 Dokumen	125.000.000	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	470.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Bangunan Gedung	300.000.000	
	1.03.08. 2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						2.450.000.000							1.852.798.843	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	2.450.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		2 Bangunan Gedung	1.852.798.843	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi					
	1.03.08. 2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						75.000.000							125.000.000	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan BangunanGedung melalui SIMBG	80 Dokumen	50 Dokumen	80 Dokumen	80 Dokumen	75.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		80 Dokumen	125.000.000	DPUPR
	1.03.08. 2.01.0031	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						470.000.000							300.000.000	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	470.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna		1 Bangunan Gedung	300.000.000	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Berkala									mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik				
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														
			Persentase Ketersediaan Trotoar Terhadap Total Panjang Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten	10,16 %	10,13 %	10,13 %	10,14 %							10,15 %		
			Persentase Trotoar Kondisi Baik	68,66 %	68,83 %	68,63 %	68,64 %							68,65 %		
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota						7.700.000.000					Kab. Temanggung		16.450.291.291	
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Kawasan	7 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	7.700.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Kawasan	16.450.291.291	
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/ Kota						7.700.000.000							16.450.291.291	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Kawasan	7 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	7.700.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		1 Kawasan	16.450.291.291	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														
			Persentase Jalan dengan Lebar Sesuai Standar Berdasarkan Fungsi Jalan	22,69 %	22,73 %	22,62 %	22,64 %							22,67 %		
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	94,40 %	92,58 %	94,37 %	94,38 %							94,39 %		
			Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	90,88 %	87,90 %	89,95 %	90,19 %							90,54 %		
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota						56.128.596.000					Kab. Temanggung		20.353.071.184	
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	100.000.000	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	200.000.000	
			Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	650,476 KM	650,476 KM	650,476 KM	650,476 KM	200.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				650,476 KM	450.000.000	
			Panjang jembatan yang dilebarkan	0	0	0	20 Meter	2.883.426.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0	0	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	26 KM	10 KM	20 KM	22 KM	10.000.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 KM	10.000.000.000	
			Panjang Jalan KewenanganKabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	0 KM	0 KM	0,7 KM	0 KM	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 KM	0	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	0	0	0	0	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0	0	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,329 KM	0,64 KM	1,45 KM	0,415 KM	23.639.862.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)/				0,438 KM	3.621.749.104	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Dana Alokasi Khusus (DAK)						
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,145 KM	0,140 KM	0 KM	0,415 KM	4.120.252.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0,415 KM	1.609.572.976	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,329 KM	0,40 KM	0,39 KM	0,415 KM	7.368.601.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0,438 KM	1.621.729.104	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	3 Jembatan	3 Jembatan	3 Jembatan	200.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Jembatan	250.000.000	
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,661 KM	1,125 KM	0,661 KM	0,661 KM	7.591.455.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0,661 KM	2.500.000.000	
	1.03.10. 2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan						50.000.000							100.000.000	
		Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		1 Dokumen	100.000.000	DPUPR
	1.03.10. 2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						75.000.000							200.000.000	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas		2 Dokumen	200.000.000	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jalan dan Jembatan yang Disusun								mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik				
	1.03.10. 2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						200.000.000							450.000.000	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	650,476 KM	650,476 KM	650,476 KM	650,476 KM	200.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		650,476 KM	450.000.000	DPUPR
	1.03.10. 2.01.0049	Pelebaran Jembatan						2.883.426.000							0	
		Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	0	0	0	20 Meter	2.883.426.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		0	0	DPUPR
	1.03.10. 2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						10.000.000.000							10.000.000.000	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	26 KM	10 KM	20 KM	22 KM	10.000.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur		22 KM	10.000.000.000	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik				
	1.03.10. 2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						0							0	
		Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan KewenangKabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	0 KM	0 KM	0,7 KM	0 KM	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		0 KM	0	DPUPR
	1.03.10. 2.01.0053	Pembangunan Jalan						0							0	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	0	0	0	0	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		0	0	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10. 2.01.0055	Rehabilitasi Jalan						23.639.862.000							3.621.749.104	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,329 KM	0,64 KM	1,45 KM	0,415 KM	23.639.862.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)/ Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		0,438 KM	3.621.749.104	DPUPR
	1.03.10. 2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						4.120.252.000							1.609.572.976	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,145 KM	0,140 KM	0 KM	0,415 KM	4.120.252.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		0,415 KM	1.609.572.976	DPUPR
	1.03.10. 2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						7.368.601.000							1.621.729.104	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,329 KM	0,40 KM	0,39 KM	0,415 KM	7.368.601.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		0,438 KM	1.621.729.104	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											produksi melalui peran aktif koperasi					
	1.03.10. 2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan						200.000.000							250.000.000	
		Terpeliharanya Secara Jembatan Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	3 Jembatan	3 Jembatan	3 Jembatan	200.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		3 Jembatan	250.000.000	DPUPR
	1.03.10. 2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar						7.591.455.000							2.500.000.000	
		Terlaksananya Jalan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,661 KM	1,125 KM	0,661 KM	0,661 KM	7.591.455.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		0,661 KM	2.500.000.000	DPUPR
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						50.000.000							63.413.108	
			Persentase Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	100 %	100 %	100 %	100 %							100 %		
	1.03.11. 2. 01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						50.000.000					Kab. Temanggung		63.413.108	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	50.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Lembaga	63.413.108	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11. 2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi						50.000.000							63.413.108	
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	50.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		30 Lembaga	63.413.108	DPUPR
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						625.000.000							963.879.244	
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang	90,68 %	98,46 %	90,38 %	90,48 %							90,58 %		
			Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Ditetapkan	100 %	16,67 %	50,01 %	66,68 %							83,35 %		
	1.03.12. 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota						300.000.000					Kab. Temanggung		300.000.000	
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	300.000.000	
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0	0	
	1.03.12. 2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/ Kota						300.000.000							300.000.000	
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan		1 Dokumen	300.000.000	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik				
	1.03.12. 2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota						0							0	
		Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				0	0	DPUPR
	1.03.12. 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						175.000.000					Kab. Temanggung		400.000.000	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	400.000.000	
	1.03.12. 2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						175.000.000							400.000.000	
		Tersedianya materi teknis dan ranper kadaRDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		1 Dokumen	400.000.000	DPUPR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDI KATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISA SI 2025	PRA KIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJAN DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PE RANG KAT DAE RAH
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12. 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota						150.000.000							263.879.244	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	263.879.244	
	1.03.12. 2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						150.000.000							263.879.244	
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik		1 Dokumen	263.879.244	DPUPR

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi meliputi penambahan pagu indikatif di beberapa program, kegiatan maupun sub kegiatan di Tahun 2027.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA DPUPR KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	89.987.824.399	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	89.987.824.399	0
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13,903,086,799	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13,903,086,799	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	2.000.000	a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	2.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.336.850.573	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.336.850.573	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.336.850.573		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.336.850.573	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.000.000	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.000.000	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.005.236.226	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.005.236.226	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	910.236.226		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	910.236.226	

RANCANGAN RENJA DPUPR KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.000.000	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.743.000.000	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.743.000.000	
a	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	a	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	75.000.000		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	75.000.000	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		
b	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.668.000.000	b	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.668.000.000	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.783.000.000		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.783.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.695.000.000		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.695.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah		
	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	40.000.000		Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	40.000.000	
	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	150.000.000		Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	150.000.000	

RANCANGAN RENJA DPUPR KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.528.239.000	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.528.239.000	
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.528.239.000	a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.528.239.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	80.000.000		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	80.000.000	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.290.533.000		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.290.533.000	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	997.706.000		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	997.706.000	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	160.000.000		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	160.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	314.902.600	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	314.902.600	
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	314.902.600	a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	314.902.600	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	314.902.600		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	314.902.600	

RANCANGAN RENJA DPUPR KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.995.000.000	5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.995.000.000	
a	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.995.000.000	a	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.995.000.000	
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.450.000.000		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.450.000.000	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	75.000.000		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	75.000.000	
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	470.000.000		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	470.000.000	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7.700.000.000	6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7.700.000.000	
a	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	7.700.000.000	a	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	7.700.000.000	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	7.700.000.000		Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	7.700.000.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	56.128.596.000	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	56.128.596.000	
a	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	56.128.596.000	a	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	56.128.596.000	
	Pengelolaan Leger Jalan	50.000.000		Pengelolaan Leger Jalan	50.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	75.000.000		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	75.000.000	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000	

RANCANGAN RENJA DPUPR KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Pelebaran Jembatan	2.883.426.000		Pelebaran Jembatan	2.883.426.000	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	10.000.000.000		Pemeliharaan Rutin Jalan	10.000.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	0		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	0	
	Pembangunan Jalan	0		Pembangunan Jalan	0	
	Rehabilitasi Jalan	23.639.862.000		Rehabilitasi Jalan	23.639.862.000	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.120.252.000		Pemeliharaan Berkala Jalan	4.120.252.000	
	Rekonstruksi Jalan	7.368.601.000		Rekonstruksi Jalan	7.368.601.000	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000		Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000	
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	7.591.455.000		Pelebaran Jalan Menuju Standar	7.591.455.000	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.000.000	8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.000.000	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	50.000.000		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	50.000.000	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	625.000.000	9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	625.000.000	
a	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	300.000.000	a	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	300.000.000	
	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	300.000.000		Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	300.000.000	
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	b	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	175.000.000		Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	175.000.000	

RANCANGAN RENJA DPUPR KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000	
		89.987.824.399			89.987.824.399	0

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2027

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa antara rancangan renja dan rkpd tahun 2027 telah sesuai dan tidak ada selisih pagu.

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
V	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH				
	Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar				
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum	%	61,00	63,63	DPUPR
2	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	%	57,56	78,58	DPUPR

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL RENSTRA 2025-2029	RUMUS PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting	%		98,7	DPUPR
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten				
		20	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten	%		97,07	DPUPR
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di Kabupaten				
		22	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya	%		100	DPUR
				Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku				
		23	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah panjang jalan kewenangan kab/kota yang mantap	%		89,8	DPUPR
				Jumlah panjang jalan keseluruhan di wilayah kab/kota				
		24	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang	%		100	DPUPR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL RENSTRA 2025-2029	RUMUS PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
			yang memiliki sertifikat kompetensi	terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis				
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten				
		25	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%		100	DPUPR
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya				
10	Pertanahan	47	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ KKPR	%		90,48	DPUPR dan DPMPSTP
				Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR				
		49	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	%		100	DPUPR
				Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan				

Tabel 5.3
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung
(sesuai pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025)

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL LPPD 2025	RUMUS PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota		%	48,89		DPUPR
		21	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota		%	87,90		DPUPR
		22	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota		%	86,18		DPUPR
		24	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir		%	100		DPUPR
		25	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Temanggung tidak terdapat pantai	%	Tidak dilaksanakan		DPUPR
		26	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota		%	100		DPUPR
		27	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah		%	100		DPUPR
		28	Persentase tenaga operator/teknisi/		%	100		DPUPR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL LPPD 2025	RUMUS PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
			analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					
		29	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota		%	13,24		DPUPR
10	Pertanahan	52	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah		%	92,18		DPUPR
		53	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan		%	100		DPUPR

BAB VI

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 95,45%, realisasi Belanja Modal sebesar 94,69%, realisasi belanja operasional Rp. 20.228.498.897,- dan realisasi belanja modal Rp. 26.298.714.456,00 dengan anggaran sebesar Rp. 48.953.235.473,00 sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Semester I terdiri dari Belanja Operasional Rp. 27.448.963.398,00 terealisasi Rp. 8.932.986.547,00 (32,54%) dan Belanja Modal Rp. 42.320.090.000,00 terealisasi Rp. 283.865.534.00 (0,67%).

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 89.987.824.399,- yang terdiri dari 9 program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 24 Juli 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005